

**20
23**

RENCANA KERJA

**DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN**



**PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Ters Simpang Danau Sentani No. 3, Telp. (0341) 716546
MALANG - 65138**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat serta karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Tahun 2023 dapat terlaksana dan menghasilkan dokumen untuk acuan pelaksanaan pembangunan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan selama satu tahun yang akan datang. Penyusunan Rencana Kerja ini mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang tahun 2018 – 2023. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata acara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Kami sampaikan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023, semoga bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan di Kota Malang pada umumnya dan dalam meningkatkan kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang di masa yang akan datang pada khususnya.

Malang, 2023
KEPALA DINAS KOPERASI,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA MALANG

Dr. EKO SRI YULIADI.S.Sos., M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19700528 199302 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	M.I-1
1.1. Latar Belakang	M.I-1
1.2. Landasan Hukum	M.I-2
1.3. Maksud dan Tujuan	M.I-4
1.3.1 Maksud.....	M.I-4
1.3.2 Tujuan.....	M.I-4
1.4. Sistematika Penulisan	M.I-5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	M.II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra.....	M.II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	M.II-55
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.....	M.II-60
2.4. Dampaknya Terhadap Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah Terhadap Capaian Program Nasional Internasional	M.II-61
2.5. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah	M.II-61
2.6. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	M.II-62
2.7. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	M.II-91
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH....	M.III-1
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional / Daerah	M.III-1
.....	M.III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	M.III-8
3.3. Program dan Kegiatan	M.III-8
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	M.IV-1
BAB V PENUTUP	M.V-1

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Bangun Industri Nasional	M.III-5
Gambar 3.2 Peta Wilayah Pengembangan Industri (WPI) Pulau Jawa	M.III-7

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel TC - 29.....	M.III-9
Tabel TC - 30.....	M.II-56
Tabel TC – 31.....	M.II-66
Tabel TC – 32.....	M.II-92
Tabel TC – 33.....	M.IV-2

M. RENCANA KERJA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Renja) merupakan dokumen perencanaan satuan kerja pemerintah daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam penyusunan rancangan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal.

Seiring dengan kedudukannya yang cukup strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, proses penyusunan Renja Tahun 2023 melibatkan tahapan dan proses awal yang cukup detail, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah. Langkah ini ditempuh guna mendapatkan gambaran secara jelas capaian target serta kondisi terkini sebagai informasi penting untuk perumusan program/kegiatan berikutnya.

Secara umum, proses penyusunan Renja 2023 terbagi dalam dua tahap yang saling berurutan:

1. Pertama, tahap perumusan rancangan Renja, yang terdiri atas kegiatan-kegiatan mendasar dalam rangka mempersiapkan bahan yang dibutuhkan untuk penyajian dokumen Renja, seperti kegiatan pengelolaan data, analisa gambaran Perangkat Daerah (PD), review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, telaah terhadap Renja Tahun 2023 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat, serta perumusan kegiatan prioritas.
2. Kedua, adalah tahap penyajian dokumen Renja yakni penyusunan rancangan Renja PD berdasarkan seluruh informasi dan bukti yang telah dikumpulkan pada tahap pertama. Selanjutnya dibahas bersama TAPD dalam menetapkan pagu indikatif hingga menjadi Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2023.

Sementara itu, terdapat prinsip-prinsip didalam penyusunan Renja yang tidak terlepas dalam tahapan proses penyusunan Renja yang harus diperhatikan. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
2. Penyusunan Renja PD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
3. Substansi Renja PD memuat evaluasi status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan PD terhadap Renstra PD, evaluasi

pelaksanaan Renja PD tahun lalu, rumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan, dana indikatif serta sumber dananya dan prakiraan maju;

4. Rumusan program/kegiatan di dalam renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah;
5. Program/kegiatan dalam Renja dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan untuk didanai APBD Kota Malang; dan
6. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.

Renja ini disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Program dan kegiatan dalam RENJA Dinas Koperasi, Perindustrian dan perdagangan Kota Malang Tahun 2023 masih bersifat indikatif karena masih harus diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas.

Sedangkan, prinsip teknis yang dipergunakan dalam penyusunan Renja PD adalah dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) selaras dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang selanjutnya akan digunakan sebagai acuan untuk penyusunan Rencana kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 merupakan kewajiban bagi setiap lembaga pemerintah seperti Badan, Dinas, Kantor serta Instansi Pemerintah yang lain. RENJA PD disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, strategi seluruh aparat Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja PD ditahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada PD.

1.2 LANDASAN HUKUM

Sebagai landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023 ini mengacu pada :

1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil dan Menengah;
6. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;

7. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
8. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tahapan, Tata Cara Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintah Pemerintah daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkaltur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 tahun 2010 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Malang Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Malang Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Walikota Malang Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
20. Peraturan Walikota Malang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal Pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan; dan
21. Peraturan Walikota Malang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pasar Pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan disusun dengan maksud untuk :

1. Memberikan gambaran mengenai arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dalam melaksanakan program dan kegiatan terhadap pembinaan kehidupan kemasyarakatan; dan
2. Sebagai pedoman perencanaan satu tahun guna membangun kinerja yang lebih akuntabel pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yang sesuai dengan Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Malang Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2018-2023 serta Rencana Strategis PD (Renstra PD) Kota Malang Tahun 2018-2023.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan bertujuan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan secara rinci, terarah, efektif, efisien, terpadu, dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan adalah:

1. Menjabarkan rencana strategis perencanaan pembangunan yang telah dituangkan dalam RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Malang Tahun 2023, dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang Tahun 2018-2023, dalam bentuk program, kegiatan, dan anggaran indikatif;
2. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam satu tahun yang tersusun dalam rencana;
3. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/ kegiatan selama satu tahun;
4. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta dapat mengambil langkah-langkah atau kebijakan mengenai tugas-tugas sesuai dengan kewenangannya;
5. Untuk mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi tahun sebelumnya;
6. Sebagai salah satu media pertanggung jawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
7. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Tahun 2023 ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun dan Capaian Renstra
- 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam menjalankan program dan kegiatan yang direncanakan, faktor-faktor apa saja yang mendukung terpenuhinya target kinerja program/kegiatan dan hambatan/kendala yang menyebabkan target tidak tercapai.

Renja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2018-2023 yang mengacu pada RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023. Perencanaan untuk Tahun 2023 harus didasari hasil evaluasi capaian renja periode sebelumnya. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (n-2) dan identifikasi faktor-faktor yang mendukung pencapaian target maupun hambatan/kendala yang menyebabkan target tidak tercapai. Hasil evaluasi dan identifikasi tersebut digunakan untuk merumuskan rencana kebijakan/tindakan yang perlu diambil dalam rangka pencapaian target pada tahun yang akan datang.

Berdasarkan APBD Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mendapatkan alokasi belanja sebesar Rp.63.951.712.373,- untuk melaksanakan 15 program yang dijabarkan dalam 25 kegiatan dan 55 sub kegiatan.

Hasil dari evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang adalah sebagai berikut:

A. Realisasi program/kegiatan pada tahun berjalan.

1. Program/kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil keluaran pada renstra yang direncanakan adalah:

- a. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi sudah terealisasi sebesar 5% dari target renstra tahun 2022 sebesar 87.10 % . Pada dasarnya penetapan target awal di tabel lelang kinerja terlalu besar sehingga persentase capaian akhirnya tidak terpenuhi. Program ini meliputi kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota dengan 2 sub kegiatan yaitu Sub.Keg.Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Sub.Keg.Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota. Sebelum mengacu pada kegiatan sesuai Permendagri 90 tahun 2019 dan setelah pemetaan maka nomenkatur kegiatan Renja yang termasuk di dalam program ini ada beberapa kegiatan yaitu Fasilitasi pembentukan dan pembubaran Koperasi dan Pembinaan kepatuhan KSP/USP Koperasi.

- b. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi dengan realisasi sebesar 10% dari target sesuai Renstra sebesar 70.05% .Hal ini disebabkan karena keterbatasan SDM petugas penilaian kesehatan Koperasi yang harus terjun ke lapangan. Walaupun sudah ada aplikasi E-Koma (E-Koperasi Malang/ E-Penkes) tetapi untuk menentukan predikat sehat/cukup sehat/kurang sehat dari Koperasi yang dinilai tetap dilakukan oleh petugas penkes yang sudah berkompeten dalam bidang ini.
- c. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM), pada kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan dengan realisasi 8 % dari target renstra di tahun 2021 sebesar 74.28 %.Hal ini disebabkan karena penetapan target awal di tabel lelang kinerja terlalu besar sehingga persentase capaian akhirnya tidak terpenuhi.
- d. Program Pengembangan UMKM kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil sub kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi dengan realisasi 0.56% dari target renstra tahun 2021 sebesar 70.39%.Hal ini disebabkan selain kesalahan dalam penetapan target namun ada beberapa point yang sulit dilakukan apabila UMKM yang naik kelas mengacu kepada UU No.20 Tahun 2008 bahwa sesuai Bab IV pasal 6 ayat 1 kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b.memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Maka usaha dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang untuk menaikkan kelas dari usaha mikro ke usaha kecil mengalami kesulitan. Disamping itu juga penguatan database di Bidang Usaha Mikro perlu ditingkatkan lagi.
- e. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan sub kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan yang mana indikator programnya adalah Persentase penetapan pasar rakyat sebagai pasar halal dengan realisasi sebesar 0% dari target Renstra tahun 2021 sebesar 3.85%.Hal ini disebabkan oleh tidak adanya dukungan kegiatan untuk memenuhi kriteria pasar halal dan belum adanya peraturan/sistem jaminan halal untuk pasar.Namun untuk mendukung Visi dan Misi Kota Malang maka rencana aksi yang dilakukan adalah mulai tribulan 2 dilaksanakan pemetaan data produk halal di 3 titik lokasi yaitu Pasar Sawojajar, Pasar Bunul dan Pujasera Sriwijaya.
- f. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri. Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri. Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk

Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota dan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan. Dengan realisasi sebesar 0 % dari target renstra pada tahun 2021 sebesar 1%. Hal ini disebabkan karena frekuensi pelaksanaan pameran/promosi dagang di masa pandemik menurun seiring dengan himbauan pemerintah untuk mengurangi mobilisasi warga dan menghindari kerumunan.

- g. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kab/Kota. Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS). Dengan realisasi sebesar 0 % dari target renstra tahun 2021 sebesar 100%. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan kegiatan pada tribulan 3 dan 4.
 - h. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri. Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota. Sub. Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), Diseminasi Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri kab/Kota melalui Sinas dan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan kegiatan pada tribulan 3 dan 4. Khusus sub.kegiatan Diseminasi Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri kab/Kota melalui Sinas dan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas mulai tribulan 2 penganggarnya dilimpahkan ke Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Malang menyesuaikan PMK 206 Tahun 2020 maka alokasi DBHCHT bidang pembinaan industri dihapus.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil keluaran pada renstra yang direncanakan adalah:
- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan realisasi sebesar 59 % dari target renstra tahun 2021 sebesar 100 %.
 - b. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi. Realisasi 50% dari target renstra tahun 2021 sebesar 56.65%.

- c. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota. Sub kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota. Dengan realisasi sebesar 35% dari target renstra sebesar 57.97%
- d. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang, Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri dan Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat. Dengan realisasi sebesar 100% dari target renstra tahun 2021=100%.
- e. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota. Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan. Dengan realisasi sebesar 0.95% dari target renstra tahun 2021 sebesar 1%.
- f. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan. Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal. Dengan realisasi sebesar 7.849 UTP dari 13.400 UTP.
- g. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri. Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri, Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri, Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri. Dengan realisasi sebesar 2 % dari target renstra tahun 2021 sebesar 5 %.

B. Realisasi program/kegiatan pada tahun lalu.

1. Program/kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil keluaran pada renstra yang direncanakan adalah:

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri. Indikator kinerjanya persentase peningkatan jumlah IKM. Capaian secara penganggaran sebesar 32.51%. Sedangkan capaian kinerja 100 %.

Tidak tercapainya indikator tersebut disebabkan

- a. Sub.Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri. Sumber dana DBHCHT Belanja Modal berupa tanah persil atau penyediaan lahan tidak dapat dilaksanakan karena tidak sesuai dengan Rencana tata Ruang Wilayah Kota Malang. Sebelumnya Diskopindag juga sudah menjalankan kegiatan Penyusunan kajian Kawasan Industri Tertentu

Hasil Tembakau Kota Malang sehingga mengeluarkan rekomendasi tentang RT/RW tersebut.

- b. Sub.Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat. Sumber dana DBHCHT

Proses pemilihan melalui tender cepat untuk belanja peralatan yang diserahkan kepada masyarakat mengalami gagal lelang sebanyak 2 (dua) kali. Kronologisnya yang pertama menggunakan metode penunjukan langsung dengan alasan di E-Katalog tidak terdapat spesifikasi yang sesuai. Karena penyedia juga tidak sanggup menyediakan barang yang dimaksud dalam waktu 14 hari kalender maka penyerapan belanja modal untuk disampaikan kepada masyarakat gagal dilaksanakan. Pada saat survei lapangan untuk pemetaan resiko pendampingan pengoperasionalan alat ditemukan sejumlah 89 orang dari 157 peserta pelatihan yang bukan merupakan buruh pabrik rokok. Yang mana hal tersebut bertolak belakang dengan ketentuan yang ada di PMK No.206/PMK.07/20202.Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran pada renstra yang direncanakan adalah:

2. Program/kegiatan yang sudah memenuhi target kinerja hasil keluaran pada renstra yang direncanakan adalah:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah .

1. Indikator kinerjanya Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu. Capaian secara penganggaran sebesar 93.93%. Sedangkan capaian kinerja 100 %.
2. Indikator kinerjanya Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik. Capaian secara penganggaran sebesar 96.25%. Sedangkan capaian kinerja 100 %.
3. Indikator kinerjanya Nilai Survey Kepuasan Internal. Capaian secara penganggaran sebesar 95.64%. Sedangkan capaian kinerja 100 %.

- b.Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi. Indikator kinerjanya Persentase koperasi aktif. Capaian secara penganggaran sebesar 96.66%. Sedangkan capaian kinerja 96.75 %.

- c.Program Penilaian Kesehatan KSP/USP . Indikator kinerjanya Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP. Capaian secara penganggaran sebesar 96.88%. Sedangkan capaian kinerja 94.38%.

- e. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian. Indikator Kinerjanya Persentase SDM Koperasi yang dididik dan dilatih. Capaian anggarannya sebesar 95.12 %. Sedangkan capaian kinerja 96.50%.

- f. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan. Indikator Kinerjanya Persentase peningkatan FasilitasPerizinan dan Pendaftaran Perusahaan Capaian anggarannya sebesar 92.50 %. Sedangkan capaian kinerja 100 %

- g. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan. Indikator Kinerjanya Persentase penetapan pasar rakyat yang ber SNI Capaian anggarannya sebesar 98.44%. Sedangkan capaian kinerja 100 %

- h. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri. Indikator Kinerjanya Persentase produk UKM yang difasilitasi dengan promosi /pemasaran Capaian anggarannya sebesar 92.29 %. Sedangkan capaian

kinerja 38 %

- i. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kab/Kota Indikator Kinerjanya Persentase Izin Usaha Industri yang diawasi Capaian anggarannya sebesar 66.67 %. Sedangkan capaian kinerja 100%
 - j. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional. Indikator Kinerjanya Persentase Informasi Industri yang lengkap dan Terkini Capaian anggarannya sebesar 92.97 %. Sedangkan capaian kinerja 100 %
 - k. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota. Indikator kinerjanya Persentase Stabilitas dan Jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok. Capaian secara penganggaran sebesar 81.35%. Sedangkan capaian kinerja 95%.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran pada renstra yang direncanakan adalah:
- a. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi. Indikator Kinerjanya . Persentase koperasi yang diberdayakan dan dilindungi Capaian anggarannya sebesar 98.74 %. Sedangkan capaian kinerja 137.50 %.
 - b. Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM). Indikator Kinerjanya Persentase WUB Mikro yang diberdayakan Capaian anggarannya sebesar 97.94 %. Sedangkan capaian kinerja 146.10 %.
 - c. Program Pengembangan UMKM. Indikator Kinerjanya Persentase Pertumbuhan Unit Usaha Mikro yang naik menjadi usaha kecil Capaian anggarannya sebesar 96.98 %. Sedangkan capaian kinerja 147.06 %

C.Faktor-Faktor Penyebab tidak tercapainya dan terpenuhinya kinerja program/kegiatan

1. Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan.
 - a. Belanja Modal berupa tanah persil atau penyediaan lahan tidak dapat dilaksanakan karena tidak sesuai dengan Rencana tata Ruang Wilayah Kota Malang. Sebelumnya Diskopindag juga sudah menjalankan kegiatan Penyusunan kajian Kawasan Industri Tertentu Hasil Tembakau Kota Malang sehingga mengeluarkan rekomendasi tentang RT/RW tersebut.
 - b. Proses pemilihan melalui tender cepat untuk belanja peralatan yang diserahkan kepada masyarakat mengalami gagal lelang sebanyak 2 (dua) kali. Kronologisnya yang pertama menggunakan metode penunjukan langsung dengan alasan di E-Katalog tidak terdapat spesifikasi yang sesuai. Karena penyedia juga tidak sanggup menyediakan barang yang dimaksud dalam waktu 14 hari kalender maka penyerapan belanja modal untuk disampaikan kepada masyarakat gagal dilaksanakan.
 - c. Pada saat survei lapangan untuk pemetaan resiko pendampingan pengoperasionalan alat ditemukan sejumlah 89 orang dari 157 peserta pelatihan yang bukan merupakan buruh pabrik rokok. Yang mana hal tersebut bertolak belakang dengan ketentuan yang ada di PMK No.206/PMK.07/2020.

2. Faktor penyebab tercapainya target kinerja program/kegiatan
 - a. Pemantauan Ketersediaan atau Distribusi Bahan Pokok dan Bahan Penting Lainnya, Publikasi Informasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting Lainnya. Harga bahan pokok cukup terkendali karena tingkat ketersediaan bahan pokok dapat memenuhi permintaan konsumen.
 - b. Pembinaan yang intensif kepada koperasi aktif di Kota Malang melalui kegiatan klinik koperasi, penilaian kesehatan koperasi KSP/USP, pembinaan kepatuhan koperasi, fasilitasi pembentukan perubahan dan pembubaran koperasi.
 - c. Pemberdayaan dan pengembangan potensi SDM Usaha Mikro melalui kegiatan Klinik Usaha Mikro dan Penyusunan Database Usaha Mikro.
 - d. Pemberdayaan dan pengembangan potensi SDM UKM melalui kegiatan bimtek e-commerce dan bimtek ekspor bagi UKM Kota Malang dan Fasilitasi Temu Usaha dan Kemitraan Usaha bagi UKM Kota Malang.
 - e. Meningkatnya standarisasi dan perlindungan konsumen melalui kegiatan pada UPT.Metrologi meliputi pelayanan terra dan terra ulang dan penyuluhan kemetrologian.
 - f. Meningkatnya kebersihan, pelayanan keamanan dan kenyamanan pengunjung pasar melalui kegiatan pada UPT.Pasar.
3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah
 - a. Perubahan indikator kinerja dan target capaian program Renstra akan mengalami perubahan sesuai dengan kondisi yang ada,
 - b. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target kinerja hasil keluaran pada renstra yang direncanakan adalah berdampak positif khususnya bagi kelancaran administrasi perkantoran dan kelompok sasaran program/kegiatan (UMKM,IKM,Koperasi dan Pedagang Pasar),
 - c. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target kinerja hasil keluaran pada renstra yang direncanakan adalah berdampak pada laporan kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan Realisasi Anggaran.
4. Kebijakan/ Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah :
 - a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan,
 - b. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk program/ kegiatan lebih difokuskan pada capaian sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pelaksanaan program dan kegiatan, secara umum telah dapat dilaksanakan dengan baik. Namun demikian perlu dilaksanakan evaluasi pelaksanaan program kegiatan berupa *review* kembali terhadap rencana jadwal pelaksanaan kegiatan sekaligus diupayakan percepatan pelaksanaan kegiatan terutama kegiatan yang belum dapat terlaksana sesuai jadwal, agar sampai dengan akhir tahun anggaran seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak terkonsentrasi pada bulan-bulan terakhir. Hal ini

tentunya memerlukan kerja sama dari berbagai pihak yang terlibat diantaranya dari sarana dan prasarana, SDM pelaksana serta regulasi yang mengatur tugas pokok dan fungsi dari Perangkat Daerah. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sampai dengan Semester I Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel T-C.29 sebagai berikut.

TABEL TC – 29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAN PENCAPAIAN
RENSTRA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SAMPAI DENGAN SEMESTER 1 TAHUN 2022
KOTA MALANG

Perangkat Daerah : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

[illegible]

KODE						Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
										Target Renja Perangk at Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Rentra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	17	03	0	00	00	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	57.97%		48.88 %	47.30%	103.34%	52.70%	47%	81.08%
2	17	03	02	01	00	Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, simpan pinjam / unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaanya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota	197 kop		371 kop	359 kop	97 %	172 kop	160 kop	81.21%
2	17	03	02	01	01	Pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang - undangan kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah unit koperasi yang diperiksa	90 Kop		90 kop	90 kop	100 %	75 kop	75 kop	83,33%

KODE						Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
										Target Renja Perangk at Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Rentra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
							Jumlah Koperasi yang difasilitasi pembentukan,perub ahan dan pembubarannya			17 Kop	19 kop	111.76%			
2	17	03	02	01	02	Pengawasan, kekuatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi kewenangan Kabupaten / Kota	Bimtek manajemen kekuatan koperasi	85 kop		0	0	0	90 kop	90 kop	100 %
2	17	05	0	00	00	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM koperasi yang didik dan dilatih	68.51%		56.65%	53.36%	94.19%	62.32%	49.64%	72.46%

KODE						Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
										Target Renja Perangk at Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Rentra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	17	05	2	01	00	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaanya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	1400 kop		430 kop	405 kop	94 %	423 kop	210 kop	15 %
							Jumlah koperasi yang melakukan RAT setelah bimtek dan meningkat pemahamannya tentang perkoperasian dan terbentuknya koperasi								
2	17	05	2	01	01	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan	Jumlah koperasi yang meningkat pemahaman, pengetahuan perkoperasian (pembentukan,								

KODE	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangk at Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Rentra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		kompetensi SDM koperasi	perubahan, pembubaran), dan melaksanakan rapat anggota							
		Jumlah pengurus/pengelola Koperasi yang mendapatkan sertifikat (SKKNI)	25 kop		0	0	0	50 Kop	50 kop	200 %
		Jumlah Koperasi KSP/USP yang mendapatkan sertifikat								
		Jumlah koperai yang difasilitasi untuk memperoleh akses permodalan dan SAKETAP								

KODE	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangk at Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Rentra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah peserta yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah (P2UKM)								
		Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pembentukan koperasi syariah								
		Jumlah pedagang pasar yang mengikuti sosialisasi pembentukan koperasi pasar								
		Jumlah unit Koperasi yang diperiksa								

KODE	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangk at Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Rentra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah pengawas koperasi yang mengikuti Bimtek								
		Jumlah koperasi yang mengikuti bimtek menejemen koperasi								
		Jumlah pengurus koperasi yang mengikuti sarasehan Jumlah pengurus koperasi atau masyarakat yang difasilitasi harkop								

KODE	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangk at Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Rentra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah koperasi yang mengikuti bimtek akuntansi usaha simpan pinjam sektor riil dan laporan keuangan SAKETAP								
		Jumlah koperasi yang mengikuti workshop standar operasional prosedur dan standar operasional manajemen simpan pinjam koperasi								

KODE						Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
										Target Renja Perangk at Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Tahun 2022
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
							Jumlah pengurus koperasi syariah yang mengikuti bimbingan teknis Koperasi Syariah dan Perhitungan Pajak								
2	17	04	0	00	00	Program Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi	Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP	91 %		83.96%	79.25%	94.38%	88,55 %	70.03%	76.96%
2	17	04	2	01	00	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya	353 kop		178 kop	129 kop	72 %	263 kop	208 kop	58,92%

KODE						Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
										Target Renja Perangk at Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Rentra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	17	04	2	01	01	Pelaksanaan Penilaian kesehatan KSP / USP koperasi kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Unit Koperasi yang dinilai sehat dan cukup sehat dan Jumlah Unit Koperasi yang mengikuti Sosialisasi E- Penkes	353 kop		178 kop	129 kop	72 %	263 kop	208 kop	58,92%
2	17	06	0	00	00	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang diberdayakan dan dilindungi	73.78 %		57.97 %	79.71%	137.50%	67.19%	120%	162.65%
2	17	06	2	01	00	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	341 kop		440 kop	605 kop	138 %	510 kop	418 kop	122 %

KODE						Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
										Target Renja Perangk at Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Rentra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	17	06	2	01	01	Pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi perkoperasian								
							Jumlah Koperasi yang difasilitasi peningkatan akses permodalan	135 orang		70 orang	70 orang	100 %	70 orang	70 orang	51.85%

KODE	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangk at Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Rentra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah dokumen penyusunan naskah akademis dan ranperda tentang perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha								
		Jumlah unit pengurus koperasi yang mengikuti sosialisasi penerapan standarisasi dan sertifikasi bagi koperasi								
		Jumlah koperasi yang difasilitasi pameran produk unggulan								

KODE						Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
										Target Renja Perangk at Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Rentra (%))
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
							Jumlah Pengurus / Pengawas / Pengelola / Anggota Koperasi yang melakukan konsultasi	502 orang		380 orang	465 orang	122 %	390 orang	238 orang	47.41%
						Urusan Pemerintahan Bidang Usaha Kecil, dan Menengah									
2	17	07	0	00	0	Program Pemberdayaan Usaha Menengah. Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase WUB Mikro yang diberdayakan	5.46%		4.62 %	6.75 %	146.10%	5.18 %	0.33%	6.04%

KODE						Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
										Target Renja Perangk at Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Rentra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	17	07	2	01	00	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah usaha mikro yang di data								
2	17	07	2	01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah database usaha mikro					100 %			
							persentase pertumbuhan WUB mikro yang tumbuh								
2	17	07	2	01	02	Pemberdayaan melalui Usaha Mikro	Jumlah kerja sama atau MoU dari keg. Temu bisnis	7 MOU					20 MOU	20 MOU	

KODE						Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
										Target Renja Perangk at Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Rentra (%))
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
							Jumlah usaha mikro yang melakukan kerjasama dengan pihak ketiga			90 UM	90 UM	100 %			
2	17	07	2	01	03	Fasilitasi kemudahan perijinan usaha mikro	jumlah usaha mikro yang memiliki ijin sertifikasi dan mendapatkan perlindungan usaha	52 UM		435 UM	420 UM	97 %	205 UM	124 UM	238 %
							Jumlah peserta sosialisasi perizinan penerapan, standarisasi dan sertifikasi serta penguatan/ perlindungan bagi usaha mikro								
2	17	07	2	01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang di fasilitasi pendampingan klinik	6530 orang		2300 orang	2741 orang	119 %	1388 orang	947 orang	15 %

KODE						Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
										Target Renja Perangk at Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Rentra (%))
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
							Jumlah UM yang difasilitasi pendampingan pemberdayaan	65 UM		90 UM	90 UM	100 %	90 UM	90 UM	138 %
							Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan ketrampilan kerja bagi Tenaga kerja dan masyarakat (calon wirausaha baru)								
2	17	07	2	01	05	Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	Jumlah stakeholder yang mengikuti forum komunikasi	137 UM		0	0	0	60 UM	0	0

KODE						Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
										Target Renja Perangk at Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Rentra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	17	08	0	00	00	Program Pengembangan UMKM	Persentase Pertumbuhan Unit Usaha Mikro yang Naik Menjadi Usaha Kecil	3.60%		3.42%	5.00%	146.20%	3.50%	1.7%	47.22%
2	17	08	2	01	00	Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha kecil	Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	90 UM		80 UM	80 UM	100 %	152 UM	152 UM	168 %
2	17	08	2	01	01	Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan pemasaran SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah usaha mikroyang difasilitasi mengikuti pameran/pemasaran produk unggulan	59 UM		22 UM	22 UM	100 %	12 UM	0 UM	0 %

KODE						Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
										Target Renja Perangk at Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Rentra (%))
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
							Jumlah usaha mikro yang menerapkan peningkatan mutu desain produk usaha dan manajemen keamanan pangan	240 UM		60 pelaku usaha	60 pelaku usaha	100 %	0	0	0 %
							Jumlah UM yang mengikuti pembinaan dan pelatihan pemasaran bagi pelaku usaha mikro	59 UM		60 UM	60 UM	100 %	140 UM	140 UM	237 %
						Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dan Perindustrian									
3	30					Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan									

KODE						Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
										Target Renja Perangk at Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Rentra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3	30	02				Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	1. Persentase peningkatan fasilitasi perizinan dan pendaftaran perusahaan 2. Persentase pertumbuhan UKM	1. 100%		100 %	100 %	100 %	100 %	0 %	
3	30	02	2	02		Kegiatan : Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase penerbitan TDG								
3	30	02	2	02	01	Sub Kegiatan: Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah gudang yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	4 kali		4 kali	4 kali		4 kali	4 kali	100%

KODE						Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
										Target Renja Perangk at Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Rentra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3	30	02	2	03		Kegiatan : Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	a.Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri b.Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri c.Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	a. 0,6% b. 0,6% c. 0,6%							
3	30	02	2	03	01	Sub Kegiatan: Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	1. Jumlah UKM yang mengikuti sosialisasi perijinan STPW 2. Jumlah UKM yang mengurus legalitas usaha setelah sosialisasi								

KODE						Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
										Target Renja Perangk at Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Rentra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3	30	02	2	05		Kegiatan: Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota								
3	30	02	2	05	01	Sub Kegiatan: Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah pembinaan dan pengawasan minuman beralkohol								

[illegible]

KODE						Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
										Target Renja Perangk at Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Rentra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3	30	03	2	01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	1. Jumlah pasar yang direvitalisasi 2. Jumlah pasar yang dipelihara 3. Jumlah pedagang yang ditampung saat revitalisasi 4. Jumlah pedagang yang akan didata 5. Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi	1.2 pasar 2. 4 pasar 3. 150 pedagang 4. 250 pedagang 5. 2 kal		1.19 pasar 3. 400 pedagang	1.19 pasar 3. 400 pedagang		1.2 pasar 2. 4 pasar 3. 150 pedagang 4. 250 pedagang 5. 2 kali	1.1 pasar 2. 20 pasar 3. 200 pedagang 4. 200 pedagang 5. 2 kali	
3	30	03	2	01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan operasional		11 jenis	11 jenis	11 jenis	100 %	12 jenis	4 jenis	

[illegible]

KODE						Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
										Target Renja Perangk at Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Rentra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3	30	03	2	02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah UKM yang telah melakukan e - commers	75 UKM	205 UKM	100 UKM	70 UKM	70 %	50 UKM	0	
							Jumlah UKM yang telah mengikuti bimtek ekspor			70 UKM	70 UKM	100 %	25 UKM	25 UKM	

KODE						Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
										Target Renja Perangk at Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Rentra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3	30	03	2	02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1. Jumlah PKL yang menerima penyuluhan 2. Jumlah toko modern yang memiliki legalitas usaha dan pembinaan terhadap pengusaha toko modern 3. Jumlah pelaksanaan monitoring terhadap target retribusi daerah 4. Jumlah akad halal pedagang 5. Jumlah peserta sosialisasi pasar rakyat yang ber SNI	1. 150 pkl 2. 50 toko modern 3. 10 kali	1.110 pkl 2.100 peserta sosialisasi 3.10 kali	112 PKL 15 unit 187 peserta 5 kali 60 lembar	60 PKL 13 unit 132 peserta 5 kali 60 lembar	81.8 %	2. 50 toko modern 5. 75 peserta	2. 50 toko modern 5. 75 peserta81.8	

KODE						Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
										Target Renja Perangk at Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Rentra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3	30	04				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase stabilisasi dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok								
3	30	04	2	02		Kegiatan: Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah penayangan informasi harga bahan pokok dan Jumlah pengadaan pasar murah								

KODE						Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
										Target Renja Perangk at Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Rentra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
						Sub Kegiatan:									
3	30	04	2	02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1. Jumlah penayangan informasi harga barang pokok dan bahan penting lainnya di media 2. Informasi harga barang kebutuhan pokok dan bahan penting lainnya berbasis online 3. Jumlah pemantauan ketersediaan/distribusi bahan pokok dan bahan penting lainnya	1. 90 kali di media cetak, 65 kali di televisi (running text) dan 1 kali di radio 2. 365 hari 3. 2 kali	365 hari	80 kali 2 kali 365 hari	80 kali 2 kali 365 hari	100 %		1. 90 kali di media cetak, 65 kali di televisi (running text) dan 1 kali di radio 2. 365 hari 3. 2 kali	100 %

[illegible]

KODE						Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
										Target Renja Perangk at Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Rentra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3	30	06	2	01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	1. Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan ops.UPT Metrologi 2.Jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang	1. 24 jenis 2.13.400 UTTP	13.400 UTTP	13.400 UTTP	13.400 UTTP	100%	13.400 UTTP	7.489 UTTP	56%
3	30	06	2	01	02	Pengawasan/Penyuluh an Metrologi Legal	1. Jumlah peserta penyuluhan kemetrologian 2. Jumlah pelaksanaan pengawasan ukur ulang barang non BDKT	1. 400 PESERTA 2. 20 kali	150 peserta	150 peserta	0	0%	300 peserta 10 kali	128 peserta 5 kali	43 % 50 %
3	30	07				Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase produk UKM yang difasilitasi dengan promosi / pemasaran	1,25%					1%	-	0%

KODE						Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
										Target Renja Perangk at Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Rentra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3	30	07	2	01		Kegiatan: Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UKM yang mengikuti pameran	20 UKM							
3	30	07	2	01	01	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah UKM yang mengikuti pameran	20 UKM	20 UKM	20 UKM	20 UKM	100%	20 UKM	-	0%
3	30	07	2	01	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah UKM yang di data	650 data	400 data	600 data	600 data	100%	600 data	-	0%
							Penyusunan ranperwal tentang Sistem Informasi Menejemen Pasar	1 NA							

KODE	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan					Indikator Kinerja program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
									Target Renja Perangk at Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Rentra (%)
1	2					3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
						Penyusunan ranperwal tentang Sistem Informasi Menejemen Retribusi	1 NA							
						Program Pengembangan Ekspor	Persentase pelaku usaha yang memperoleh pelatihan atau fasilitasi pengembangan ekspor	0,65%						
						Kegiatan: Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada satu daerah Kabupateen/Kota	Jumlah peserta bimtek ekspor bagi UKM Kota Malang	80 UKM						

[illegible]

KODE						Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
										Target Renja Perangk at Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Rentra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3	31	02	2	01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah sasaran pembangunan sumber daya manusia industri, pengembangan dan pemanfaatan teknologi serta pemanfaatan dan jaminan ketersediaan sumber daya alam								
3	31	02	2	01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah penerima fasilitasi standarisasi dan pengembangan perwilayahan industri								

KODE						Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
										Target Renja Perangk at Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Rentra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3	31	02	2	01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi, industri hijau dan pemberdayaan industri kecil dan menengah								
3	31	02	2	01	06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah dokumen evaluasi rencana pembangunan industri Kota Malang								
3	31	03				Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase Izin Usaha Industri yang di awasi								

KODE						Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
										Target Renja Perangk at Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Rentra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3	31	03	2	01		Kegiatan: Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Izin usaha IKM yang dipantau dan diawasi								
3	31	03	2	01	02	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Izin usaha IKM yang dipantau dan diawasi								

[illegible]

[illegible]

KODE						Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
										Target Renja Perangk at Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Rentra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3	31	04	2	01	03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas									
						Program penunjang Urusan pemerintah Daerah	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu								
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan di kantor Diskopindag								

KODE	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangk at Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Rentra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah							
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah alat tulis kantor							
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan							
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan							
		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah perkiraan kegiatan peringatan / kegiatan isidentil							

KODE	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan					Indikator Kinerja program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
									Target Renja Perangk at Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Rentra (%)
1	2					3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penanganan dan evaluasi kinerja Dinas							
						Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah							
						Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja							

KODE	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan					Indikator Kinerja program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
									Target Renja Perangk at Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Rentra (%)
1	2					3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
						Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen hasil survey kepuasan masyarakat							
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan dan tersedianya gaji serta tunjangan ASN							
						Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan							

KODE	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangk at Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Rentra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah bulan pelayanan gaji ASN Diskopindag								
		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah							
		Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah							
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	umlah ASN yang mengikuti diklat pegawai berdasarkan tugas dan fungsi							
		Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah sumberdaya aparatur yang ditingkatkan/dikemb angkan kapasitasnya							

KODE	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangk at Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Rentra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah bahan anjab/abk SKPD							
		Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas / pakaian khusus							
		Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah tagihan belanja listrik, air, telpon, jumlah surat menyurat dan luasan ruangan yang dibersihkan							
		Penyediaan jasa komunikasi, air, dan listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja telepon, air dan listrik							
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat yang teradministrasi dengan baik							

KODE	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangk at Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Rentra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Luasan ruangan yang dibersihkan							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas / operasional, luasan gedung, peralatan dan mesin lainya yang terpelihara							
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara							
		Pemeliharaan / Rehabilitasi gedungkantor dan bangunan lainnya	Luasan gedung kantor yang dipelihara							

KODE	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangk at Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Rentra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara							
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Jumlah peralatan, perlengkapan gedung kantor							
		Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan, perlengkapan gedung kantor							

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, 2022

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, analisis kinerja pelayanan PD berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) maupun terhadap IKU (Indikator Kinerja Utama).

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Sedangkan, IKU (Indikator Kinerja Utama) adalah indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Rangkuman tentang Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan disajikan sebagaimana pada Tabel T-C.30 di bawah ini :

Tabel : TC – 30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Kota Malang

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK (Indikator Kinerja Kunci)	Target Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2024	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sasaran Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro											
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI											
	Persentase koperasi aktif	N/A	N/A	79.85 %	48.88%	52.70%	57.97%	47.30%	47 %			
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP / USP KOPERASI											
	Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP	N/A	N/A	N/A	83.96%	88.55%	91%	79.25%	70.03%			
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN											
	Persentase SDM Koperasi yang dididik dan dilatih	N/A	N/A	N/A	56.65%	62.00%	68.51%	53.36%	24.48%			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI											
	Persentase koperasi yang diberdayakan dan dilindungi	N/A	N/A	N/A	57.97%	67.19%	73.78%	79.71%	49.90%			

[illegible]

[illegible]

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK (Indikator Kinerja Kunci)	Target Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis 2021
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2024	Tahun 2024	
	USAHA INDUSTRI KAB/KOTA											
	Persentase Izin Usaha Industri yang diawasi				100%	100%	100%	100 %	0 %			
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL											
	Persentase Informasi Industri yang lengkap dan terkini				1 sistem	1 sistem	1 sistem	1 sistem	1 sistem			

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang 2022

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan

Tingkat capaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sudah optimal namun tidaklah menutup kemungkinan masih terdapat berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan tentunya dalam melayani berbagai kebutuhan administrasi masyarakat. Berikut ini adalah permasalahan sekaligus upaya tindak lanjut yang dihadapi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan antara lain:

1. Kualitas SDM Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan masih terbatas;
2. Belum Optimalnya Validasi data keragaan Koperasi dan Usaha Mikro yang akurat dan Update;
3. Belum sepenuhnya koperasi melaksanakan RAT;
4. Kualitas Sumber Daya Koperasi belum memahami terhadap penilaian kesehatan, kepatuhan dan ketaatan peraturan perundang-undangan Koperasi masih terbatas;
5. Masih rendahnya tingkat pendidikan ketrampilan kerja bagi usaha mikro sehingga masih memerlukan pendampingan dalam menjalankan usahanya;
6. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana kantor;
7. Masih perlunya peningkatan kapasitas aparatur Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
8. Kompetensi Aparatur kurang memadai dalam mengantisipasi isu;
9. Belum dilakukannya kerjasama secara intensif dengan lembaga pendidikan bidang industri berbasis kompetensi (tidak *overlapping* dengan kewenangan provinsi);
10. Minimnya pemahaman dan standarisasi industri serta perlindungan HKI yang belum optimal;
11. Belum adanya lembaga sertifikasi produk dan penyediaan laboratorium untuk menguji standarisasi produk industri;
12. Sistem informasi perindustrian belum berjalan dengan optimal;
13. Lemahnya validasi dan updating database perindustrian yang realtime yang mampu menggambarkan kondisi perindustrian terkini;
14. Kurang memaksimalkan keterlibatan *stakeholder* (*Colaborative Governance*) terhadap industri kecil;
15. Minimnya pemanfaatan teknologi bagi IKM;
16. Rendahnya sinergisitas riset pengembangan teknologi dengan lembaga riset;
17. Belum adanya penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreativitas dan berinovasi;
18. Belum terbentuknya kawasan industri kreatif Kota Malang;
19. Belum optimalnya pengembangan industri berbasis sentra dan klaster;
20. Belum optimalnya fasilitasi yang diberikan kepada industri kecil baik fasilitasi kemitraan, promosi dan pemasaran maupun pendampingan;
21. Potensi SDA dan SDM belum dioptimalkan untuk penguatan komoditas unggulan;

22. Masih lemahnya kualitas dan upaya menciptakan differensiasi dan diversifikasi produk industri kecil;
 23. Belum adanya pengelolaan yang baik kepada anggota paguyuban/asosiasi masyarakat industri;
 24. Pengembangan ekonomi lokal dengan optimalisasi segenap potensi;
 25. Pengembangan perdagangan dengan optimalisasi pemberdayaan sentra industri dan produk unggulan daerah;
 26. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku usaha perdagangan;
 27. Peningkatan kualitas dan daya saing UKM Kota Malang;
 28. Peningkatan ekspor dengan optimalisasi akses pasar dalam maupun luar negeri;
 29. Peningkatan penggunaan produk dalam daerah untuk mendorong pengembangan perdagangan lokal;
 30. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dengan mendorong peningkatan kualitas dan perluasan pasar;
 31. Peningkatan perlindungan konsumen;
 32. Peningkatan kemetrolagian daerah;
 33. Peningkatan kualitas kelembagaan usaha perdagangan;
 34. Penyediaan akses pembiayaan dan penjaminan bagi usaha perdagangan;
 35. Peningkatan daya saing pelaku usaha perdagangan;
 36. Peningkatan koordinasi dan sinergisitas program/kegiatan dan pendanaan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
 37. Peningkatan inovasi daerah serta integrasi pembinaan perdagangan; dan
 38. Optimalisasi pendapatan dengan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan.
- 2.4. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional.
- Apabila permasalahan yang ada dalam mencapai target kinerja dalam pelayanan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang akan mempengaruhi misi kepala daerah dimana instansi ini mengampu 2 (dua) Misi yaitu :
- Misi 1. Menjamin Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Dasar Lainnya Bagi Semua Warga
- Misi 2. Mewujudkan Kota Produktif dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Kreatif, Keberlanjutan dan Keterpaduan
- 2.5 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah
- Dalam mensikapi adanya hambatan dan permasalahan di dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang berupaya semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan semua sumber daya yang ada untuk mengatasinya. Adapun peluang dan tantangan yang dihadapi adalah :
- Peluang :
1. Kemajuan Teknologi Informasi yang cukup pesat
 2. Terbukanya peluang bekerjasama dengan berbagai pihak
 3. Adanya peraturan Perundang-undangan di bidang Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan.

4. Masih tersedia sarana prasarana yang memadai

Tantangan :

1. Memaksimalkan anggaran yang terbatas sehingga efektif dan efisien
2. Terpenuhi target kinerja sesuai IKU
3. Terpenuhi kebutuhan sarana dan prasarana penunjang program/kegiatan

Upaya Tindakan terhadap permasalahan:

- a. Menekankan pada pembangunan sumber daya industri (SDM industri, pengembangan dan pemanfaatan SDA, serta pemanfaatan dan pengembangan teknologi), pengembangan sarana dan prasarana (perwilayahan industri seperti sentra industri dan penetapan kawasan khusus industri, standarisasi dan perlindungan kekayaan intelektual/KI, serta pengelolaan sistem informasi industri), dan pemberdayaan industri (pemberdayaan IKM, pemanfaatan kreativitas dan inovasi, pengembangan industri hijau).
- b. Masih diperlukan program dan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan persentase koperasi yang aktif sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi sebagai wujud ekonomi rakyat.
- c. Mengingat peran Usaha Mikro yang besar dalam mendukung perekonomian daerah dan jumlah Usaha Mikro baru yang terus bertambah maka Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan berkewajiban untuk membantu Usaha Mikro tersebut untuk ditingkatkan kualitasnya sehingga memiliki daya saing ditingkat yang lebih luas.

2.6. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Tahun 2023 terdiri dari Rancangan awal RKPD didasarkan pada analisis kebutuhan setiap organisasi Perangkat Daerah. Namun demikian, pada tahap lebih lanjut dilakukan pembahasan dan evaluasi terhadap rancangan awal RKPD melalui forum Perangkat Daerah/Forum Gabungan Perangkat Daerah dan musrenbang kota. Mendasar pada masukan-masukan dari berbagai pihak dan juga memperhatikan kemampuan keuangan daerah, kemudian dilakukan penyempurnaan terhadap rancangan RKPD. Dengan banyaknya kebutuhan akan anggaran biaya kegiatan, tidak seluruh rencana kegiatan dapat terakomodir mengingat keterbatasan anggaran yang ada. Oleh karena itu dibuat urutan skala prioritas untuk menentukan urutan program dan kegiatan serta adanya penyederhanaan beberapa program dan kegiatan.

Rancangan awal RKPD dibuat melalui perencanaan dari bawah dengan mempertimbangkan berbagai faktor antara lain SDM, dana, kebutuhan masyarakat, dan faktor lain yang terkait. Oleh sebab itu perencanaan dibuat berdasarkan skala prioritas, sehingga apa yang direncanakan tidak akan berbeda jauh dengan hasil analisis kebutuhan. Program dan kegiatan dari rancangan awal RKPD kemudian disempurnakan baik dari besaran dananya, penyederhanaan program dan kegiatan serta adanya kegiatan tambahan yang memang harus dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah sebagai langkah tindak lanjut terhadap berbagai masukan pada saat Musrenbang dan Forum gabungan

Perangkat Daerah serta penyesuaian rekening kegiatan dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan.

Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan merencanakan untuk melaksanakan 15 (sembilan) program yang dijabarkan dalam 24 Kegiatan dan 48 Sub Kegiatan yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah meliputi 8 kegiatan dan 20 sub kegiatan;
2. Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro meliputi 1 kegiatan dan 5 Sub kegiatan;
3. Program Pengembangan UMKM meliputi 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan;
4. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi kegiatan meliputi 1 kegiatan dan 1 Sub kegiatan;
5. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi meliputi 1 kegiatan dan 1 Sub kegiatan ;
6. Program pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi meliputi 1 kegiatan dan 1 Sub kegiatan;
7. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian meliputi 1 kegiatan dan 1 Sub kegiatan;
8. Program Perijinan dan Pendaftaran Perusahaan meliputi 3 kegiatan dan 3 sub kegiatan; dan
9. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan meliputi 2 kegiatan dan 4 Sub Kegiatan
10. Program Stabilisasi dan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting meliputi 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan
11. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen meliputi 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan ;
12. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri meliputi 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan.
13. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri meliputi 1 kegiatan dan 4 Sub Kegiatan
14. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kab/Kota meliputi 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan
15. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri meliputi 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan.

Pada Rancangan akhir Rencana Kerja tahun 2023 telah memuat nomenklatur Perencanaan Pembangunan yang sudah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 yang meliputi 1 kegiatan dan 2 Sub kegiatan :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari 8 kegiatan dan 19 Sub Kegiatan
2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi yang terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan
3. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian yang terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan
4. Program Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi yang terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan
5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang terdiri dari 1

- kegiatan dan 1 sub kegiatan
6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) yang terdiri dari 1 kegiatan dan 5 sub kegiatan
 7. Program Pengembangan UMKM yang terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan
 8. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan yang terdiri dari 3 kegiatan dan 3 sub kegiatan
 9. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan yang terdiri dari 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan
 10. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan
 11. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen yang terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan.
 12. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri yang terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan.

Dengan pagu indikatif awal sesuai SE Walikota Nomor 11 Tahun 2022 sebesar Rp. 52.037.058.000 (*Lima puluh dua milyar tiga puluh tujuh juta lima puluh delapan ribu rupiah*) termasuk di dalamnya terdapat gaji dan tunjangan TPP sebesar 25.023.169.777 (*Dua puluh lima milyar dua puluh tiga juta serratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah*), Insentif sebesar Rp. 355.000.000,- (*tiga ratus lima puluh lima juta rupiah*), Fasilitas Hibah Kadin Rp. 200.000.000,- (*Dua ratus juta rupiah*), belanja prioritas Musrenbang sebesar Rp. 4.960.050.000,- (*Empat milyar sembilan ratus enam puluh juta lima puluh ribu rupiah*) dan Belanja Operasional Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi sebesar Rp. 21.498.838.223,- (*Dua puluh satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah*).

Pagu indikatif sesuai SE Walikota Nomor sebesar Rp. 63.951.712.373,61 (*Enam puluh tiga milyar sembilan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah*) termasuk di dalamnya terdapat gaji, tunjangan TPP naik 4% dan BPJS sebesar 26.645.374.150. (*Dua puluh enam milyar enam ratus empat puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu serratus lima puluh ribu rupiah*) Insentif sebesar Rp. 355.000.000,- (*tiga ratus lima puluh lima juta rupiah*), Fasilitas Hibah Kadin Rp. 250.000.000,-, (*Dua ratus lima puluh juta rupiah*) Fasilitas Hibah Dekopinda Rp. 400.000.000,- (*Empat ratus juta rupiah*), belanja prioritas Musrenbang sebesar Rp. 351.210.000,- (*Tiga ratus lima puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah*), Belanja Operasional dan Aktivasi MCC sebesar Rp. 8.000.000.000 (*Delapan milyar rupiah*), Pokir sebesar Rp. 3.297.450.000 (*Tiga milyar dua ratus sembilang puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*) dan Belanja Operasional Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi sebesar Rp. 25.657.678.223 (*Dua puluh lima milyar enam ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah*)

Dinamika dan analisis yang dilakukan menyebabkan beberapa perubahan dalam penyusunan Rancangan Akhir Renja. Beberapa rasionalisasi program/kegiatan dilakukan. Adapun program dan kegiatan yang direncanakan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 serta hasil analisis kebutuhan secara rinci terlihat pada tabel T-C.31 berikut ini:

Tabel : T-C. 31

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		TOTAL BELANJA			63.951..000					122.336.429.140	
	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KOPERASI UKM					URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KOPERASI UKM				53.427.585.140	
	Program penunjang Urusan pemerintah Daerah		Nilai survey kepuasan internal	80		Program penunjang Urusan pemerintah Daerah		Nilai survey kepuasan internal	80	45.106.055.640	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terpenuhinya kebutuhan di kantor Diskopindag	100%	1.870.032.501	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, makanan dan minuman, alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dan perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil	45 kali	2.474.323.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dalam Daerah, Luar Daerah, Luar Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	840.000.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dalam Daerah, Luar Daerah, Luar Provinsi	jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	45 kali		
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Malang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	54 paket	236.996.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Malang	Jumlah alat tulis kantor	54 jenis ATK		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Malang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16 paket	549.601.501	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Malang	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	16 jenis		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Kota Malang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 dokumen	243.435.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Kota Malang	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	3 jenis surat kabar		
	Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Malang	Jumlah dokumen perencanaan, penanggaran dan evaluasi kinerja Dinas	14 dok	236.990.000	Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Malang	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	13 dok		
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kota Malang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dok	81.990.000	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kota Malang	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dok		

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Malang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 laporan	10.000.000	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Malang	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	2 dok		
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Malang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	145.000.000	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Malang	Jumlah dokumen hasil survey kepuasan masyarakat	5 dok		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Malang	Jumlah laporan keuangan dan tersedianya gaji serta tunjangan ASN	2 laporan	25.405.819.777	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Malang	-	-		
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kota Malang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	27.650.000	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kota Malang	Jumlah laporan keuangan	2 dok		
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Kota Malang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	253 orang/bulan	25.378.169.777	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Kota Malang	Jumlah ASN Diskopindag	261 ASN		Ada penurunan insentif retribusi PAD sebesar 10 juta

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kota Malang	Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah	1 laporan	75.395.000	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kota Malang	Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah	300 orang		
	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Kota Malang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	75.395.000	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Kota Malang	Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah	300 orang		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Malang	Jumlah ASN yang mengikuti diklat pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	300 orang	70.267.603	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Malang	Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya	300 orang		
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kota Malang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	300 orang	70.267.603	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kota Malang	Jumlah sumberdaya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya	300 org		
	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan tagihan belanja listrik, air, telpon, jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat dan jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	14 laporan	1.455.046.061	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah bulan pembayaran belanja telepon, air dan listrik dst	12 bulan		
	Penyediaan jasa komunikasi, air, dan listrik	Kota Malang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	12 Laporan	445.327.761	Penyediaan jasa komunikasi, air, dan listrik	Kota Malang	Jumlah bulan pembayaran belanja telepon, air dan listrik	12 bulan		

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			dan Listrik yang Disediakan								
	Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Malang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	1 laporan	273.172.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Malang	Jumlah surat menyurat yang teradministrasi dengan baik	2500 surat		
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kota Malang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	736.546.300	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kota Malang	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1.182.384 m2		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kota Malang	Jumlah kendaraan dinas / operasional, luasan gedung, peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	66 Unit	1.911.878.065	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kota Malang	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional pengadaan BBM dan pelumas	50 unit		
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Malang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	55 unit	1.536.878.065	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Malang	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	55 unit		
	Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kota Malang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	320.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kota Malang	Luasan gedung kantor yang dipelihara	630 m2		

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kota Malang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 unit	55.000.000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kota Malang	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	6 jenis		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Kota Malang	Jumlah eralatan, perlengkapan gedung kantor	11 unit	114.730.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Kota Malang	Jumlah pengadaan peralatan, perlengkapan gedung kantor	11 jenis		
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kota Malang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 unit	114.730.000	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kota Malang	Jumlah peralatan, perlengkapan gedung kantor	11 jenis		
	BIDANG KOPERASI					BIDANG KOPERASI					
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Kota Malang	Persentase koperasi aktif	57,97%	132.523.000	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Kota Malang	Persentase koperasi aktif	52,70%		

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, Koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaanya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Kota Malang	Jumlah pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota	90 Unit Usaha Koperasi	132.523.000	Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, Koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaanya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Kota Malang	Jumlah koperasi yang akan dilakukan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi dalam rangka kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan	172 koperasi		
	Pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang - undangan kewenangan Kabupaten/ Kota	Kota Malang	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	90 unit usaha	67.523.000	Pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang - undangan kewenangan Kabupaten/ Kota	Kota Malang	Jumlah unit koperasi yang difasilitasi pembentukan dan perubahannya	75 koperasi		

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi kewenangan Kabupaten / Kota	Kota Malang	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	85 unit usaha	65.000.000	Pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi kewenangan Kabupaten / Kota	Kota Malang	Jumlah koperasi yang dimonitoring dan dievaluasi	70 peserta		
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Kota Malang	Persentase SDM koperasi yang didik dan dilatih	68,51%	495.685.000	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Kota Malang	Persentase SDM koperasi yang didik dan dilatih	62%		
	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaanya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Kota Malang	Jumlah SDM koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	688 orang	495.685.000	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaanya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Kota Malang	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi	839 koperasi		
	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	Kota Malang	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	688 orang	495.685.000	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	Kota Malang	Jumlah koperasi yang melakukan RAT setelah bimtek dan meningkat pemahamannya ttenga perkoperasian dan terbentuknya koperasi	313 koperasi		

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi	Kota Malang	Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP	91%	200.450.000	Program Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi	Kota Malang	Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP	15,00%		
	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Kota Malang	Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya	353 Unit Usaha	200.450.000	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Kota Malang	Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya	494 koperasi		
	Pelaksanaan Penilaian kesehatan KSP / USP koperasi kewenangan Kabupaten Kota	Kota Malang	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	353 Unit Usaha	200.450.000	Pelaksanaan Penilaian kesehatan KSP / USP koperasi kewenangan Kabupaten Kota	Kota Malang	Pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi dan pemberian penghargaan kesehatan KSP/USP Koperasi	120 koperasi		
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Kota Malang	Persentase koperasi yang diberdayakan dan dilindungi	73,78%	294.967.000	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Kota Malang	Persentase koperasi yang diberdayakan dan dilindungi	67,19%		

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Kota Malang	Jumlah fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	686 unit usaha	294.967.000	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Kota Malang	Pemberdayaan peningkatan produktivitas nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, dan restrukturisasi usaha koperasi	680 Koperasi		
	Pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan Kabupaten / Kota	Kota Malang	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	686 unit usaha	294.967.000	Pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan Kabupaten / Kota	Kota Malang	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi perkoperasian dan jumlah pengurus koperasi yang mengikuti fasilitasi klinik koperasi, fasilitasi produk koperasi, akses permodalan	570 koperasi		Ada tambahan hibah untuk dekopinda sebesar 200 juta, Pokir dewan
	BIDANG USAHA MIKRO				1.816.177.100	BIDANG USAHA MIKRO					

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Kota Malang	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Binaan yang Naik Menjadi Usaha Kecil	5,46%	1.628.125.900	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Kota Malang	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Binaan yang Naik Menjadi Usaha Kecil	5,18%		
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kota Malang	Jumlah Dokumen usaha mikro yang di data	1 Dokumen	1.628.125.900	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kota Malang	Jumlah MoU usaha mikro yang memiliki izin usaha dan yang difasilitasi pendampingan klinik	90 sertifikat		
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kota Malang	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1 Dokumen	187.725.900	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kota Malang	Jumlah data base usaha mikro dan jumlah database yang dimutakhirkan	1 aplikasi		
	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kota Malang	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	137 Unit Usaha	100.000.000	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kota Malang	Jumlah usaha mikro yang melakukan kerjasama atau temu bisnis	20 MOU		

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Fasilitasi kemudahan perijinan usaha mikro	Kota Malang	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	435 Unit Usaha	152.479.176	Fasilitasi kemudahan perijinan usaha mikro	Kota Malang	1. Jumlah usaha mikro yang memiliki sertifikasi dan mendapatkan perlindungan usahan 2. Jumlah usaha mikro yang memiliki izin sertifikasi dan mendapatkan perlindungan usaha 3. Jumlah usaha mikro yang memiliki izin sertifikasi dan mendapatkan perlindungan usaha	1. 10 sertifikat halal 2. 10 uji nutrisi 3. 50 merk		
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kota Malang	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	3765 Unit Usaha	1.124.935.224	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kota Malang	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi pendampingan dan pengembangan usaha	1605 UM		
	Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	Kota Malang	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	137 orang	62.985.600	Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	Kota Malang	Jumlah stakeholder yang mengikuti forum komunikasi	60 orang		

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Pengembangan UMKM	Kota Malang	Persentase Pertumbuhan Unit Usaha Mikro yang Naik Menjadi Usaha Kecil	3,60%	188.051.200	Program Pengembangan UMKM	Kota Malang	Persentase Pertumbuhan Unit Usaha Mikro yang Naik Menjadi Usaha Kecil	3,50%		
	Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha kecil	Kota Malang	Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	300 Unit Usaha	188.051.200	Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha kecil	Kota Malang	Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	12 UM		
	Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan pemasaran SDM, serta Desain dan Teknologi	Dalam Provinsi dan luar provinsi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	300 Unit Usaha	188.051.200	Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan pemasaran SDM, serta Desain dan Teknologi	Dalam Provinsi dan luar provinsi	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi mengikuti pameran/pemasaran produk unggulan, menerapkan peningkatan mutu desain produk usaha dan manajemen keamanan pangan dan menerapkan pemasaran secara online dan offline	230 UM		
								POKIR DEWAN			
	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dan Perindustrian				17.957.096.893	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dan Perindustrian					

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan				12.351.073.604	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan					
	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Kota Malang	1. Persentase peningkatan fasilitasi perizinan dan pendaftaran perusahaan 2. Persentase pertumbuhan UKM	100%	164.516.400	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Kota Malang	Persentase peningkatan fasilitasi perizinan dan pendaftaran perusahaan	1. 100%		
	Kegiatan : Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Gudang yang ada di Kota Malang	Persentase penerbitan TDG		54.838.800	Kegiatan : Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Gudang yang ada di Kota Malang	Jumlah gudang yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	3%		
	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Gudang yang ada di Kota Malang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	10 Dokumen	54.838.800	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Gudang yang ada di Kota Malang	Jumlah gudang yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	5 kali		
	Kegiatan : Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Kota Malang	a.Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri b.Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri c.Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri		54.838.800	Kegiatan : Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Kota Malang	Jumlah Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	139 UKM		

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Kota Malang	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	5 Dokumen	54.838.800	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Kota Malang	1. Jumlah UKM yang mengikuti sosialisasi perijinan STPW 2. Jumlah UKM yang mengurus legalitas usaha setelah sosialisasi	1. 120 UKM 2. 19 UKM		
	Kegiatan: Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Tempat berjualan minuman beralkohol di Kota Malang	Jumlah dokumen pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	5 Dokumen	54.838.800	Kegiatan: Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Tempat berjualan minuman beralkohol di Kota Malang	Jumlah pembinaan dan pengawasan minuman beralkohol	5 kali		
	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Tempat berjualan minuman beralkohol di Kota Malang	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	5 Dokumen	54.838.800	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Tempat berjualan minuman beralkohol di Kota Malang	Jumlah pembinaan dan pengawasan minuman beralkohol	5 kali		

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pasar rakyat yang dikelola oleh Pemkot Malang	Persentase penetapan pasar rakyat yang ber SNI	7,69%	10.887.001.504	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pasar rakyat yang dikelola oleh Pemkot Malang	Persentase penetapan pasar rakyat sebagai pasar halal	%		
	Kegiatan : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pasar rakyat yang dikelola oleh Pemkot Malang	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya		10.514.502.704	Kegiatan : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pasar rakyat yang dikelola oleh Pemkot Malang	Jumlah pasar yang direvitalisasi	6 pasar		
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pasar rakyat yang dikelola oleh Pemkot Malang	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	6 Unit	4.192.877.076	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pasar rakyat yang dikelola oleh Pemkot Malang	Jumlah pasar yang terpelihara	2 pasar		
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	26 pasar rakyat	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	16 Unit	6.321.625.628	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	26 pasar rakyat	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan operasional	12 jenis		
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Malang	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	54.838.800	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Malang	Jumlah peserta bimtek ekspor bagi UKM Kota Malang	80 UKM		

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Malang	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	317.660.000	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Malang	Jumlahpeserta sosialisasi pengelolaan pasar rakyat sesuai SNI	80 orang		
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Kota Malang	Persentase stabilisasi dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok		1,75%	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Kota Malang	Persentase stabilisasi dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	1,50%		
	Kegiatan: Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Kota Malang	Jumlah penayangan informasi harga bahan pokok dan Jumlah pengadaan pasar murah	350 hari dan 1 kali ops.pasar	250.000.000	Kegiatan: Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Kota Malang	Jumlah pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	365 hari		

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kota Malang	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	200.000.000	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kota Malang	1. Jumlah penayangan informasi harga barang pokok dan bahan penting lainnya di media 2. Informasi harga barang kebutuhan pokok dan bahan penting lainnya berbasis online 3. Jumlah pemantauan ketersediaan/distribusi bahan pokok dan bahan penting lainnya	1. 90 kali di media cetak, 65 kali di televisi (running text) dan 1 kali di radio 2. 365 hari 3. 2 kali		
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kota Malang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	50.000.000	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kota Malang	Jumlah pengadaan pasar murah	1 kali		
	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Kota Malang	Persentase Jumlah Alat UTP yang di Tera dan Tera Ulang	100%	391.570.900	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Kota Malang	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	1,5%		

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kegiatan: Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Kota Malang	1. Jumlah Alat UTTP yang di Tera dan Tera Ulang 2. Jumlah Pengawasan 3. Jumlah peserta penyuluhan kemetrologian	13,400UT TP 4 kali pengawasan an 400 orang	391.570.900	Kegiatan: Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Kota Malang	Jumlah pengawasan alat UTTP	10 lokasi		
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kota Malang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	13.400 UTTP	361.570.900	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kota Malang	1. Jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang 2. Jumlah pengawasan 3. Jumlah peserta penyuluhan kemetrologian	1. 13.400 UTTP 2. 22 kali 3. 32 peserta		
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Kota Malang	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal	400 orang	30.000.000	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Kota Malang	1. Jumlah peserta penyuluhan kemetrologian 2. Jumlah pelaksanaan pengawasan ukur ulang barang non BDKT	1. 400 peserta 2. 20 kali		
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Kota Malang	Persentase produk UKM yang difasilitasi dengan promosi / pemasaran	1,50%	603.146.000	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Kota Malang	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	1,50%		

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kegiatan: Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kota Malang	Jumlah UKM yang mengikuti pameran	30 UMKM	603.146.000	Kegiatan: Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kota Malang	Jumlah UKM yang terfasilitasi	20 UKM		
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	Indonesia	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	30 UMKM	600.076.000	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	Indonesia	Jumlah UKM yang mengikuti pameran	20 UKM		
	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Kota Malang	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	1 Dokumen	3.070.000	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Kota Malang	1. Jumlah ranperwal tentang sistem informasi manajemen pasar 2. Jumlah ranperwal tentang sistem informasi manajemen retribusi	1. 1 naskah akademik 2. 1 naskah akademik		
							Kota Malang	Penyusunan ranperwal tentang Sistem Informasi Menejemen Pasar	1 Naskah Akademik		
							Kota Malang	Penyusunan ranperwal tentang Sistem Informasi Menejemen Retribusi	1 Naskah Akademik		
	Program Pengembangan Ekspor	Kota Malang	Persentase pelaku usaha yang memperoleh pelatihan atau	0,70%	54.838.800						

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			fasilitasi pengembangan ekspor								
	Kegiatan Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada satu daerah Kabupateen/ Kota	Kota Malang	Jumlah peserta bimtek ekspor bagi UKM Kota Malang	80 Pelaku Usaha	54.838.800						
	Sub Kegiatan: Misi Dagang bagi produk ekspor unggulan	Kota Malang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	80 Pelaku Usaha	54.838.800						
	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian				5.606.023.289	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian					
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Kota Malang	Persentase peningkatan jumlah IKM	5%	5.456.023.289	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Kota Malang	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	2%		

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kegiatan: Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Kota Malang	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIN yang ditetapkan dalam RPIK	80%	5.456.023.289	Kegiatan: Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Kota Malang	Jumlah kegiatan dalam RPIK yang dilaksanakan			
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kota Malang	1.Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya 2.Jumlah sasaran pembangunan sumber daya manusia industri, pengembangan dan pemanfaatan teknologi serta pemanfaatan dan jaminan ketersediaan sumber daya alam Industri	1 Dokumen 350 IKM	452.500.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kota Malang	Jumlah sasaran pembangunan sumber daya manusia industri, pengembangan dan pemanfaatan teknologi serta pemanfaatan dan jaminan ketersediaan sumber daya alam	330 IKM dan 4 dokumen		
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kota Malang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen 350 IKM	300.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kota Malang	Jumlah penerima fasilitasi standarisasi dan pengembangan perwilayahan industri	70 IKM		

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kota Malang	1. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 2. Jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi, industri hijau dan pemberdayaan industri kecil dan menengah	1 Dokumen 2000 IKM	4.673.523.289	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kota Malang	Jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi, industri hijau dan pemberdayaan industri kecil dan menengah	700 IKM		
	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kota Malang	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	30.000.000	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kota Malang	Jumlah dokumen evaluasi rencana pembangunan industri Kota Malang	1 dok		
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Kota Malang	Persentase Izin Usaha Industri yang di awasi	100%	50.000.000	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Kota Malang	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	1,5%		

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kegiatan: Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Malang	Jumlah Izin usaha IKM yang dipantau dan diawasi	100 IKM	50.000.000	Kegiatan: Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Malang	-	-		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kota Malang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kota Malang	Jumlah Izin usaha IKM yang dipantau dan diawasi	100 IKM		

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional		persentase informasi industri yang lengkap dan terkini	1 sistem	100.000.000	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional		persentase peningkatan fasilitas perizinan dan pendaftaran perusahaan	100%		
	Kegiatan: Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Malang	persentase data perusahaan IKM yang masuk dalam SIINAS terhadap total populasi perusahaan IKM	100%	100.000.000	Kegiatan: Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Malang	jumlah sistem informasi industri yang dimutakhirkan	1 sistem		
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kota Malang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	100.000.000	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kota Malang	jumlah sistem informasi yang terintegrasi	1 sistem data		

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang 2022

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan inventarisasi usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat, dilakukan penyesuaian dengan nomenklatur program/kegiatan yang berlaku. Kemudian dilakukan penelitian kelengkapan informasi dari usulan, terutama mengenai jenis kegiatan, indikator kinerja, lokasi, dan besaran volume kegiatan, bila perlu dilakukan konfirmasi atau diberi catatan untuk dikonfirmasi dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan. Usulan program/kegiatan tersebut sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Diantaranya meliputi :

- a. Masih rendahnya tingkat pendidikan ketrampilan kerja bagi usaha mikro sehingga masih memerlukan pendampingan dalam menjalankan usahanya hal ini sesuai usulan dari Kelurahan Cemorokandang untuk mengakomodir kegiatan Fasilitas Promosi Produk Usaha Mikro.
- b. Memjembatani Koperasi untuk bermitra dengan pihak ketiga dimana salah satu kriterianya adalah kesehatan Koperasi dan tata cara pembentukan koperasi oleh karena itu sesuai usulan musrenbang dari kelurahan Kedungkandang yaitu Sosialisasi Penilaian Kesehatan Koperasi dan sosialisasi perkoperasian bagi masyarakat.
- c. Belum optimalnya fasilitasi yang diberikan kepada industri kecil baik fasilitasi kemitraan, promosi dan pemasaran maupun pendampingan sehingga kelurahan cemorokandang mengusulkan untuk diadakannya workshop teknis industri kreatif.
- d. Pengembangan ekonomi lokal dengan optimalisasi segenap potensi yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas belum sepenuhnya dijalankan sehingga perlu mengakomodir usulan musrenbang dari Kelurahan Tlogomas yaitu pendampingan usaha mikro berkembang.
- e. Peningkatan kualitas dan daya saing UKM Kota Malang sehingga diperlukan sinergitas antara instansi Pembina dengan kelompok sasaran maupun stakeholder yang terkait. Sesuai usulan dari Kelurahan Kotalama dan Polehan untuk mengadakan pelatihan skincare.

Rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan disajikan pada Tabel T-C.32 sebagai berikut:

Tabel TC – 32
Usulan Program Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kota Malang

Perangkat Daerah : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

No	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Besaran (Rp)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi						
	Kegiatan:Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaan Dalam Daerah/Kab/Kota						
	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Peningkatan Produktifitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kab/Kota	Bimbingan Teknis Perkoperasian Bagi Masyarakat Milenial	Kecamatan di Kota Malang	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi perkoperasian dan jumlah pengurus koperasi yang mengikuti fasilitasi klinik koperasi, fasilitasi produk koperasi, akses permodalan	300 orang	655.000	Usulan Musrenbang 60 orang per kecamatan
		Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi	Koperasi berbadan hukum dan masih aktif	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi perkoperasian dan jumlah pengurus koperasi yang mengikuti fasilitasi klinik koperasi, fasilitasi produk koperasi, akses permodalan	100 orang	350.000	Usulan Musrenbang
2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi						
	Kegiatan : Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, simpan pinjam / unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaanya dalam Daerah Kabupaten / Kota						

No	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Besaran (Rp)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Sub Kegiatan : Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi pemberantasan koperasi berentenir	Tokoh Masyarakat dan pejabat setingkat kelurahan.	Jumlah pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota	50 orang	350.000	Usulan Musrenbang
3	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian						
	Kegiatan : Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kab/Kota						
	Sub Kegiatan : Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoerasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Fasilitasi Pendirian Koperasi Modern	Masyarakat (orang perorangan, Kelompok. Paguyuban, Pedagang , Pasar Rakyat) yang mempunyai usaha sektor riil (dagang, produksi,kerajinan,dll)	Jumlah Koperasi yang melakukan RAT setelah bimtek dan meningkat pemahamannya tentang perkoperasian dan terbentuknya koperasi	250 orang	350.000	Usulan Musrenbang 50 orang per Kecamatan
4	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)						
	Kegiatan : Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil						

No	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Besaran (Rp)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Pendampingan Pengembangan dan Penguatan Usaha Mikro (INKUBATOR BISNIS)	Pelaku Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi mengikuti pameran/pemasaran produk unggulan, menerapkan peningkatan mutu desain produk usaha dan manajemen keamanan pangan dan menerapkan pemasaran secara online dan offline	70 UM	15.000.000	Berupa pendampingan secara melekat oleh tenaga ahli mulai dari Kualitas produk, Management keuangan, perijinan, packaging, pemasaran, profiling dan motivasi bagi UMKM didalam melakukan kegiatan usaha
	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Pelatihan Pembuatan Cookies	Pelaku Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi mengikuti pameran/pemasaran produk unggulan, menerapkan peningkatan mutu desain produk usaha dan manajemen keamanan pangan dan menerapkan pemasaran secara online dan offline	60 UM	1.500.000	Peningkatan kualitas Produk Cookie bagi Wira Usaha Baru
	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Subsidi Sewa Stand di Tempat - Tempat yang Strategis (Bandara, Stasiun, Mall, Dll)	Pelaku Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi mengikuti pameran/pemasaran produk unggulan, menerapkan peningkatan mutu desain produk usaha dan manajemen keamanan pangan dan menerapkan pemasaran secara online dan offline	1 bulan	7.500.000	Mensubsidi sewa stan bagi komunitas UMKM di lokasi yang strategis didalam

No	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Besaran (Rp)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							pemasaran offline sebanyak 1 Stand selama 12 Bulan
	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Magang Desain Busana bagi CWUB	Pelaku Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi mengikuti pameran/pemasaran produk unggulan, menerapkan peningkatan mutu desain produk usaha dan manajemen keamanan pangan dan menerapkan pemasaran secara online dan offline	25 UM	3.000.000	Meningkatkan secara efektif tenaga trampil bagi Calon Wira Usaha Baru dan Pekerja Rumahan
	Sub Kegiatan : Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Fasilitas pendaftaran merek Barang/Jasa gratis	Pelaku Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang memiliki izin sertifikasi, dan mendapatkan perlindungan usaha	Merk =4 UM/Kel. NIB = 3 UM/kel	650.000	Memberikan Fasilitas pendaftaran merek Barang/Jasa gratis dan memberikan pendampingan dalam pembuatan NIB dan IUMK untuk memberikan perlindungan kepada usaha mikro agar pengembangan usaha lebih cepat dan bebas gangguan karena telah

No	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Besaran (Rp)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							memiliki legalitas.
5	Program Perencanaan dan pembangunan Industri						
	Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota						
	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Workshop Teknis Industri Kreatif (sub sektor Kriya dan Fashion)	IKM	Jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi, industri hijau dan pemberdayaan industri kecil menengah	100 orang	1.000.000	Persyaratan : 1, Calon peserta memiliki usaha di sektor produksi kriya atau fashion selama minimal 1 tahun 2. Memiliki IUMK/NIB 3. Masih aktif berproduksi
	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	Inkubator Industri	IKM	Jumlah sasaran pembangunan sumber daya manusia industri, pengembangan dan pemanfaatan teknologi serta pemanfaatan dan jaminan ketersediaan sumber daya alam	50 IKM	3.000.000	Pelatihan dan pendampingan intensif dalam konsistensi kualitas produk bagi

No	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Besaran (Rp)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) : Persyaratan peserta : 1. KTP Kota Malang 2. Usia Produktif 18-55 tahun 3. Memiliki IUMK/NIB/merk 4. Masih aktif berproduksi, minimal telah berproduksi selama 2 tahun 5. Jumlah Peserta 50 IKM
	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasaran Industri	Fasilitasi Sertifikasi Halal, BPOM,SNI dan Uji Nutrisi	IKM	Jumlah sasaran pembangunan sumber daya manusia industri, pengembangan dan pemanfaatan teknologi serta pemanfaatan dan jaminan ketersediaan sumber daya alam	100 IKM	5.500.000	Persyaratan peserta : 1. KTP Kota Malang 2. Usia Produktif 18-55 tahun 3. Memiliki produk yang wajib sertifikasi halal/SNI/BPOM 4. Memiliki

No	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Besaran (Rp)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							IUMK/NIB/merk 5. Masih aktif berproduksi, minimal telah berproduksi selama 2 tahun 6. Halal 100 IKM 7. Uji Nutrisi 150 IKM 8. BPOM 100 IKM
	Program Pengembangan Ekspor						
	Kegiatan : Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada satu daerah Kabupateen/Kota						
	Sub Kegiatan : Misi Dagang bagi produk ekspor unggulan	Bimtek Ekspor bagi UKM Kota Malang yang mempunyai peluang ekspor	IKM	Jumlah peserta bimtek ekspor bagi UKM Kota Malang		2.000.000	UKM/Pelaku Usaha Yang memiliki modal > 1M (tidak termasuk gedung bangunan) memiliki NIB, SIUP, NPWP, usia produktif yang berorientasi

No	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Besaran (Rp)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							ekspor 10 Orang @ Kecamatan (mendatangkan narasumber dari Kampus Shopee Ekspor)sub kegiatan pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan
		Peningkatan Pengetahuan Ekspor bagi UKM Potensial Kota malang	IKM	Jumlah peserta bimtek ekspor bagi UKM Kota Malang		5.000.000	Mengirim UKM/Pelaku Usaha Yang memiliki modal > 1M (tidak termasuk gedung bangunan) memiliki NIB, SIUP, NPWP, usia produktif yang berorientasi ekspor 5 Orang @ Kecamatan Ke Kampus Shopee

No	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Besaran (Rp)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Ekspor di Solo sub kegiatan pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, 2022

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional/Daerah

Telaah terhadap kebijakan Pemerintah Daerah, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kota Malang, dimana secara teknokratis prioritas telah mengacu pada prioritas pembangunan nasional. Maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2018 – 2024 dicanangkan visi pembangunan Kota Malang.

Dalam Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI diuraikan bahwa Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam pembangunan bidang ekonomi secara eksplisit UUD 1945 menekankan implementasi azas kekeluargaan (pasal 33 ayat 1) dan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi (pasal 33 ayat 4). Selaras dengan itu, kebijakan yang berpihak (*affirmative policy*) terhadap Koperasi dan Usaha Mikro, telah menjadi harapan yang berkembang luas di tengah tumbuhnya kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap nasib ekonomi rakyat. Oleh karena itu, selain pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, aspek penting yang menjadi agenda besar dalam proses pembangunan ekonomi hari ini dan ke depan adalah kemandirian ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

Dalam hal ini pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat Indonesia (*pro poor*). Selain itu, potensi dan peran strategisnya telah terbukti menjadi penopang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi nasional (*pro growth*). Keberadaan Koperasi dan Usaha Mikro yang dominan sebagai pelaku ekonomi nasional juga merupakan subyek vital dalam pembangunan, khususnya dalam rangka perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran (*pro job*). Pendekatan pembangunan yang ditujukan pada pelaku ekonomi, khususnya pada urusan koperasi dan usaha mikro, amat penting.

Langkah ini sekaligus untuk mempertegas penataan struktur pelaku ekonomi nasional yang selama ini dalam kondisi dualistik dan timpang. Pembangunan yang ditujukan kepada Koperasi dan Usaha Mikro diharapkan menghantarkan penataan struktur pelaku ekonomi nasional lebih padu dan seimbang, baik dalam skala usaha, strata dan sektoral, sehingga berkembang struktur pelaku ekonomi nasional yang kokoh dan mandiri. Dengan memperhatikan peran dan potensinya dalam perekonomian nasional, keberadaan Koperasi dan Usaha Mikro terbukti merupakan pelaku usaha yang mandiri, kukuh dan fleksibel, dalam kondisi normal maupun krisis sekalipun. Bahkan tidak dapat disangkal oleh siapapun bahwa Koperasi dan Usaha Mikro merupakan leader perekonomian Indonesia dan menjadi jantung ekonomi rakyat, dan pelopor tumbuhnya ekonomi kerakyatan. Dengan mempertimbangkan kondisi internal maupun eksternal, dinas Koperasi dan Usaha Mikro telah menetapkan 5 (Lima) arah kebijakan prioritas bidang Koperasi dan Usaha Mikro yang akan ditempuh dalam periode lima tahun mendatang, yaitu :

1. Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan Usaha Mikro. Arah kebijakan ini ditujukan untuk mewujudkan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang lebih koordinatif dan partisipatif, didukung peningkatan peran Lembaga-Lembaga swasta dan masyarakat; menyediakan regulasi/kebijakan nasional dan daerah yang mendukung pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, serta menurunkan pungutan yang menghambat perkembangan usaha Koperasi.
2. Peningkatan akses kepada sumber daya produktif. Arah kebijakan ini ditujukan untuk peningkatan akses Koperasi dan Usaha Mikro kepada sumber daya produktif terutama berkaitan dengan jangkauan dan jenis sumber pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan usaha Koperasi dan Usaha Mikro, bagian penting untuk meningkatkan usaha masyarakat yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Sumber daya produktif dimaksud juga berkaitan dengan peningkatan akses teknologi, akses pasar dan pemasaran bagi koperasi dan Usaha Mikro.

No.	Sub Urusan Wajib	Kewenangan Kab/ Kota	Program	Kegiatan
1.	Pendidikan dan Latihan perkoperasian	• Pendidikan dan Latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah lintas daerah kab/ kota	Program Pembinaan Koperasi	• Peningkatan Kapasitas manajer KSP/ USP dan Sertifikasi • Sosialisasi penerapan standarisasi dan sertifikasi bagi koperasi
				• Bimtek Pelaksanaan RAT Koperasi
				• Bimtek penyusunan Laporan Keuangan berbasis SAK ETAP
				• Bimtek SOP dan SOM simpan pinjam Koperasi
				• Bimtek akuntansi Simpan pinjam
				• Bimtek Koperasi Sariah
				• Bimtek perhitungan pajak bagi koperasi
2.	Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi	• Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah Kab/ Kota	Program Pembinaan Koperasi	• Penyusunan Naskah Akademis dan ranperda tentang perlindungan dan pemebrdayaan koperasi dan usaha mikro
				• Fasilitasi pembentukan perubahan dan pembubaran koperasi
				• Sosialisasi perkoperasian bagi kelompok masyarakat
				• Fasilitasi partisipasi koperasi dan masyarakat dalam peringatan hari koperasi
				• Fasilitasi kegiatan Dekopinda

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, 2020

3. Pengembangan produk dan pemasaran bagi Koperasi dan Usaha Mikro. Arah kebijakan ini ditujukan untuk pengembangan produk Koperasi dan Usaha Mikro yang berkualitas, inovatif dan kreatif yang bersaing baik di pasar luar Propinsi maupun Nasional.
4. Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan Usaha Mikro. Arah kebijakan ini ditujukan untuk peningkatan kapasitas dan produktivitas Koperasi

3.	Pengawasan dan Pemeriksaan	• Pemeriksaan dan pengawasan Koperasi yang dalam daerah	Program Pembinaan Koperasi	• Pemeriksaan dan penguatan administrasi koperasi
		• Pemeriksaan& Pengawasan Koperasi Simpan pinjam /Unit simpat pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah		• Bimtek Manajemen Pengawasan Koperasi
	Penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/ Unit simpan pinjam koperasi yang wialaya keanggotaanya dalam daerah Kab/Kota	Program Pembinaan Koperasi	• Pembinaan dan penilaian kesehatan bagi USP / KSP
4.	Pemberdayaan usaha menengah , usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan , kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Program pengembang an Usaha Mikro	• Fasilitasi perlindungan usaha bagi produk usaha mikro
				• Fasilitasi klnik usaha mikro
				• Forum Komunikasi Para Pakar Pelaku Usaha Mikro
				• Reviu penyusunan database usaha mikro
				• Fasilitasi Pendampingan pemberdayaan UM
5.	Pengembangan UMKM	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjasi menjadi usaha kecil	Program pengembang an Usaha Mikro	• Pengembangan jaringan pemasaran produk usaha mikro kota malang
				• Pembinaan dan pelatihan pemasaran bagi pelaku usaha mikro
				• Temu Bisnis bagi Pelaku Usaha Mikro
				• Gelar Produk UMKM
			Program pembinaan lingkungan sosial di bidang usaha mikro	• Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat (calon wirausaha baru) • Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat (usaha mikro)

dan Usaha Mikro, yang didukung pengusaha, pengelola dan pekerja yang memiliki kompetensi yang tinggi dan wirausaha handal serta meningkatkan jumlah wirausaha baru yang didukung pola pengembangan kewirausahaan yang tersistem. Dilaksanakan juga revitalisasi sistem pendidikan pelatihan dan penyuluhan perkoperasian.

5. Penguatan kelembagaan Koperasi. Arah kebijakan ini ditujukan untuk pengembangan praktek berkoperasi yang sesuai nilai, jati diri, prinsip dan asas Koperasi serta peningkatan peran Koperasi dalam memfasilitasi perkembangan usaha anggota dan peningkatan kesejahteraan anggota.

Kebijakan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan adalah :

1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur dan kapisitas kelembagaan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang ;
2. Meningkatkan Koordinasi lintas sektor dan Lintas PD dalam pengembangan urusan Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Malang

3. Meningkatkan dukungan dan fasilitasi urusan Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Malang.

Dalam Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional Tahun 2015-2035, visi pengembangan industri nasional adalah :

1. Struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat, dan berkeadilan
2. Industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global
3. Industri yang berbasis inovasi dan teknologi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri nasional mengemban misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. Memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional;
3. Meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau;
4. Menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. Meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Strategi yang ditempuh untuk mencapai visi dan misi pembangunan industri nasional adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam;
2. Melakukan pengendalian ekspor bahan mentah dan sumber energi;
3. Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) industri;
4. Menetapkan Wilayah Pengembangan Industri (WPI);
5. Mengembangkan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), kawasan peruntukan industri, kawasan industri, dan sentra industri kecil dan industri menengah;
6. Menyediakan langkah-langkah afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada industri kecil dan industri menengah;
7. Melakukan pembangunan sarana dan prasarana industri;
8. Melakukan pembangunan industri hijau;
9. Melakukan pembangunan industri strategis;
10. Melakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan
11. Meningkatkan kerjasama internasional bidang industri.

Penetapan capaian pembangunan industri prioritas dilakukan untuk jangka menengah dan jangka panjang. Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), tahapan dan arah rencana pembangunan industri nasional diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap I (2015-2019)

Arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam pada

industri hulu berbasis agro, mineral dan migas, yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan SDM yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi.

2. Tahap II (2020-2024)

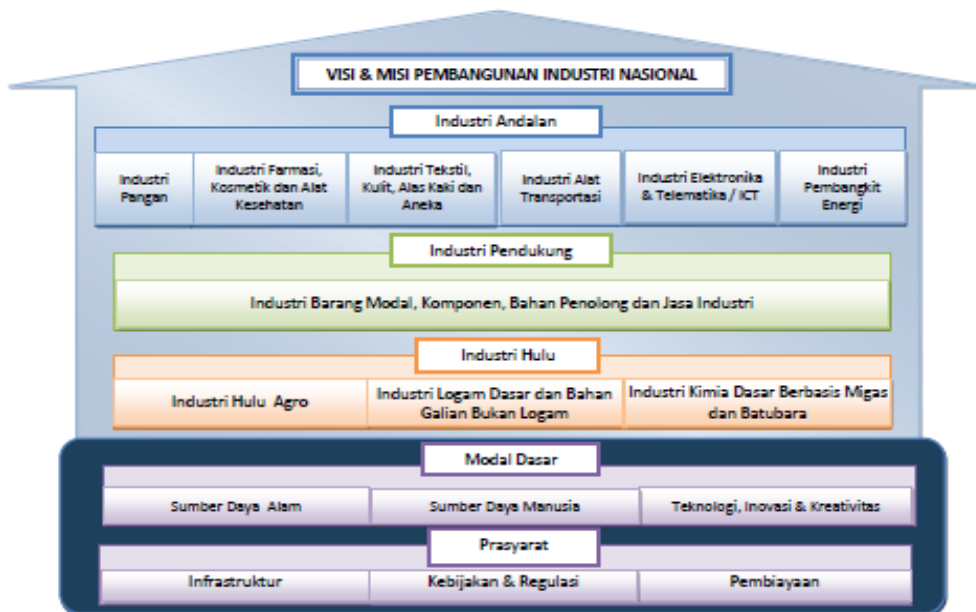
Arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas.

3. Tahap III (2025-2035)

Arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Industri Tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi.

Bangun industri nasional berisikan industri andalan masa depan, industri pendukung, dan industri hulu, dimana ketiga kelompok industri tersebut memerlukan modal dasar berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, serta teknologi, inovasi, dan kreativitas. Pembangunan industri di masa depan tersebut juga memerlukan prasyarat berupa ketersediaan infrastruktur dan pembiayaan yang memadai, serta didukung oleh kebijakan dan regulasi yang efektif.

Gambar 3.1 Bangun Industri Nasional



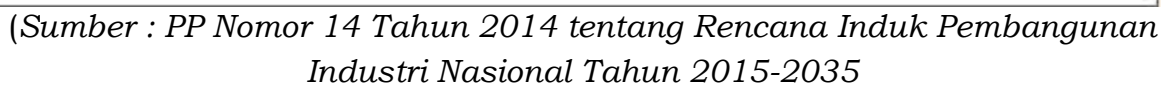
(Sumber: PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035)

Dalam rangka percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dalam rangka memudahkan sinergi dan koordinasi dalam pembangunan industri di daerah, maka secara administratif wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi ke dalam 10 (sepuluh) Wilayah Pengembangan Industri (WPI). WPI ditentukan berdasarkan keterkaitan ke belakang (backward) dan keterkaitan ke depan (forward) sumberdaya dan fasilitas pendukungnya, serta memperhatikan jangkauan pengaruh kegiatan pembangunan industri.

Sesuai dengan amanat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, maka selanjutnya perwilayahan industri dilakukan melalui pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, pengembangan Kawasan

Peruntukan Industri, pembangunan Kawasan Industri dan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah.

Di Provinsi Jawa Timur sendiri, Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) meliputi Tuban, Lamongan, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, dan Bangkalan. Sedangkan di Provinsi Jawa Timur, Kawasan Industri (KI) yang ditetapkan meliputi KI Tuban, KI Lamongan KI Gresik, KI Bangkalan, KI Jombang, dan KI Banyuwangi. Hal ini sesuai dengan ketentuan bahwa Kawasan Industri diprioritaskan berada di Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI). Namun daerah di luar WPPI namun mempunyai potensi untuk dapat dibangun Kawasan Industri masih dapat dibangun Kawasan Industri. Dengan demikian maka Kota Malang diposisikan sebagai penyangga dari WPPI yang ada di Provinsi Jawa Timur. Meskipun tidak termasuk dalam WPPI maupun tidak ditetapkan mempunyai Kawasan Industri, Kota Malang mempunyai peluang untuk mengembangkan industri melalui Kawasan Peruntukan Industri yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang dan pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah dimana setiap kabupaten/kota kemungkinan besar mempunyai minimal 1 sentra industri kecil dan menengah. Maka dari itu pembangunan industri di Kota Malang lebih difokuskan pada pengembangan industri kecil dan menengah sesuai amanat dari RIPIN.



Kementerian Perdagangan menetapkan tujuan pembangunan perdagangan untuk 5 (lima) tahun ke depan yaitu Terbangunnya Perdagangan yang Tangguh dan Berdaya Saing. Ukuran keberhasilan pencapaian tujuan tersebut dijelaskan dalam Sasaran Strategis Kementerian Perdagangan meliputi :

1. Meningkatnya peran perdagangan dalam perekonomian nasional;
2. Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri;
3. Meningkatnya penyebaran dan pemerataan perdagangan;
4. Meningkatnya peran IKM dalam perekonomian nasional;
5. Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi;
6. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor perdagangan; dan
7. Menguatnya struktur perdagangan.

1. Peningkatan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa;
2. Peningkatan pengamanan perdagangan;
3. Peningkatan akses dan pangsa pasar internasional;
4. Pemantapan promosi ekspor dan nation branding;
5. Peningkatan efektivitas pengelolaan impor barang dan jasa;
6. Pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri;
7. Peningkatan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri (PDN);
8. Optimalisasi/penguatan pasar berjangka komoditi, SRG dan pasar lelang;
9. Peningkatan kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting;

10. Peningkatan perlindungan konsumen;
11. Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha;
12. Peningkatan kualitas kinerja organisasi;
13. Peningkatan dukungan kinerja perdagangan; dan
14. Peningkatan kebijakan perdagangan yang harmonis dan berbasis kajian;

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang menentukan kebijakan meningkatkan peran serta masyarakat untuk mendukung UKM yang kreatif dan inovatif, meningkatkan peran UKM untuk meningkatkan daya saing perdagangan, meningkatkan ekspor dan import mengembangkan potensi pasar tradisional setara dengan pasar modern serta penataan, pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan PKL .

Selain itu kebijakan lain yang selaras antara lain memperlancar arus barang dan jasa dengan meningkatkan efisiensi perdagangan dalam negeri, peningkatan produk ekspor, serta meningkatkan produktivitas dan penguasaan teknologi. Perkembangan kegiatan perekonomian Kota Malang dicerminkan dengan PDRB menurut harga konstan maupun harga berlaku. Peningkatan PDRB diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sebagai sebuah strategi *Renaissance* Ekonomi yang sinergis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan tingkat kemiskinan di Kota Malang, melalui optimalisasi produktivitas rakyat dengan menempatkan manusia sebagai subyek dan aset aktif dalam pembangunan secara berkelanjutan. Adapun peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kota Malang Tahun 2023 dilakukan melalui pembangunan secara terencana untuk menyempurnakan program dan kegiatan tahun sebelumnya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Sesuai Perencanaan Strategis Tahun 2018-2023. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi misi dan juga merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan. Sedangkan Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tujuan:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif
2. Meningkatkan daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan

Sasaran:

1. Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro;
2. Meningkatnya kualitas pasar;
3. Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen dan stabilitas harga pokok;
4. Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing industri; dan
5. Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah.

3.3. Program Dan Kegiatan

Untuk mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dalam pencapaian program prioritas maka disusun program dan kegiatan sesuai kewenangan Dinas Koperasi,

Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang yang menjabarkan Visi dan Misi tersebut. Selain Hal tersebut diharapkan dalam penyusunan program dan kegiatan dapat memberikan dukungan terhadap penurunan angka kemiskinan di Kota Malang dengan menjangkau aspirasi dan masyarakat melalui forum perangkat daerah.

Tahun 2023 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang merencanakan 15 program yang dijabarkan dalam 24 kegiatan dan 54 sub kegiatan yang terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
3. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
6. Program Pengembangan UMKM
7. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
8. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
9. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
10. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
11. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
12. Program Pengembangan Ekspor
13. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
14. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
15. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

dengan pagu indikatif sebesar Rp.122.336.429.140,- (Seratus dua puluh dua milyar tiga ratus tiga puluh enam juta empat ratus dua puluh sembilan ribu seratus empat puluh rupiah). Rumusan program dan kegiatan yang terdapat dalam rencana kerja Tahun 2023 terdapat beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD baik itu jenis kegiatan maupun pagu Indikatif. Hal ini karena beberapa pertimbangan analisis kebutuhan serta prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan.

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan juga dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang ingin dicapai sebagai alat ukur untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.

1. Sekretariat terdiri dari satu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah meliputi 8 kegiatan dan 19 Sub Kegiatan. Dimana indikator programnya adalah survey kepuasan internal. Pada program ini meliputi kegiatan-kegiatan yang bersifat mensupport kelancaran pelaksanaan program/kegiatan bidang dan terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran.
2. Bidang Koperasi terdiri dari 4 program, 4 kegiatan dan 4 sub kegiatan. Diantaranya sesuai dengan fungsinya bahwa kegiatan di bidang koperasi seperti perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan telah tertuang di dalam program/kegiatan tersebut. Secara dua tahun berturut-turut bidang Koperasi memperoleh dana Hibah sebesar Rp.100 juta dan di tahun 2023 sebesar Rp. 75 juta melekat di Program Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi. Dana ini

- diperuntukkan kepada Dekopinda sebagai sarana fasilitasi gerakan Koperasi seperti penyelenggaraan lomba-lomba perkoperasian untuk menyambut hari Koperasi Nasional yang jatuh pada tanggal 12 Juli.
3. Bidang Usaha Mikro terdiri dari 2 Program, 2 kegiatan dan 6 sub kegiatan. Dimana sesuai tusunya di bidang ini adalah untuk Pelaksanaan promosi akses pasar bagi produk usaha mikro di dalam dan di luar negeri serta pelaksanaan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil dan menengah juga pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha mikro. Secara garis besar pada level usaha mikro ini pemerintah dalam hal ini Kementrian Koperasi dan UKM berusaha memaksimalkan pemberian bantuan bagi pelaku UMKM atas dampak dari pandemic covid 19 . Pelaksanaannya dimulai tahun 2020 dan kembali dilaksanakan pada 2021. Untuk tingkat daerah bidang Usaha Mikro ini juga mengakomodir usulan pikir dan musrenbang untuk pendampingan dan pemberdayaan UMKM. Disamping itu juga ada anggaran sebesar Rp. 1,5 milyar untuk program pemulihan ekonomi nasional.
 4. Bidang Perindustrian terdiri dari 3 Program, 3 kegiatan dan 6 sub kegiatan. Sesuai tusu dari Bidang Perindustrian bahwa Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industry dan guna mendukung sasaran misi kepada daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif maka seperti yang tertuang dalam RPJMD Kota Malang untuk mengembangkan Sentra UMKM dan Ekonomi Kreatif, serta pembangunan Gedung Malang Creative Center (MCC), maka perlu diupayakan untuk dimulai pembetulan kelembagaan UPT.MCC yang rencana penganggaran di tahun 2023 adalah aktivasi dan operasionalnya. Sedangkan proses harmonisasi naskah akademis dan ranperwalnya dalam proses di Bagian Organisasi dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang.
 5. Bidang Perdagangan terdiri dari 5 Program, 8 Kegiatan dan 14 Sub Kegiatan. Terdapat satu proyek strategis di tahun anggaran 2022 yang melekat pada Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan yaitu pembangunan pasar besar dengan anggaran sebesar 125 milyar. Pada tahun 2021 telah dilaksanakan kegiatan pembuatan DED nya. Saat PAK di tahun 2021 juga telah dianggarkan penilaian / appresial pasar besar dengan pagu anggaran Rp.100 Juta. Pada bidang ini salah satu Program/Kegiatannya yaitu terdapat sub.kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan juga mendukung kinerja kepala perangkat daerah yaitu meningkatnya persentase pasar halal. .

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang membuat program dan kegiatan agar dapat merealisasikan tujuan dan sasaran, serta kebijakan dan pembangunan bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian dan perdagangan di Kota Malang yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan tahun 2018-2023 yang merupakan turunan dari RPJMD Kota Malang tahun 2018-2023. Secara lengkap rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Tahun 2023 beserta proyeksi maju tahun 2023 dapat dilihat pada Bab IV yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun 2023 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Tahun 2023 penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama PD Lingkup Pemerintah Daerah Kota Malang maupun dengan PD yang membidangi fungsi lain.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dapat dilihat sebagaimana pada tabel T-C 33.

Tabel 4.1

T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2023

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2023				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2024	
					Lokasi	Keluaran	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1112	12
			TOTAL PENETAPAN PAGU				82.623.464.145				
			TOTAL BELANJA				82.623.464.145				165.071.777.835
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI UKM				6.835.614.849				9.511.477.695
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai Evaluasi SAKIP	Program penunjang Urusan pemerintah Daerah	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu		100%	26.423.399.500			100%	45.760.253.140
				Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		80%	2.445.610.765			80%	
				Nilai survey kepuasan internal		80	3.694.399.067			80	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan di kantor Diskopindag		100%	2.162.033.103	Block Grant	-		2.285.815.000
			Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam Daerah, Luar Daerah, Luar Provinsi	100 Laporan	1.165.542.602	Block Grant	-	45 kali	1.420.039.000
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Malang	54 paket	218.000.000	Block Grant	-	54 jenis ATK	392.095.000

M.IV-3

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2023				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2024	
					Lokasi	Keluaran	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1112	12
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Malang	16 paket	543.425.501	Block Grant	-	16 jenis	344.605.000
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Malang	3 dokumen	235.065.000	Block Grant	-	3 jenis surat kabar	29.076.000
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penanggaran dan evaluasi kinerja Dinas	Kota Malang	14 dok	197.135.350	Block Grant	-	13 dok	340.000.000
			Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Malang	6 dok	46.695.350	Block Grant	-	6 dok	165.000.000
			Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Malang	6 laporan	9.000.000	Block Grant	-	2 dok	80.000.000
			Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Malang	2 laporan	141.440.000	Block Grant	-	5 dok	95.000.000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan dan tersedianya gaji serta tunjangan ASN	Kota Malang	2 laporan	26.226.264.150	Block Grant	-	2 dok	37.289.206.140
			Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Kota Malang	2 laporan	67.330.000	Block Grant	-	2 dok	130.842.000

M.IV-4

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2023				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2024	
					Lokasi	Keluaran	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1112	12
				Keuangan Akhir Tahun SKPD							
			Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		253 orang/bulan	26.158.934.150	Block Grant			37.158.364.140
			Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah	Kota Malang	1 laporan	69.815.000	Block Grant	-	1 dok	200.000.000
			Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Malang	1 laporan	69.815.000	Block Grant	-	1 dok	200.000.000
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti diklat pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kota Malang	300 orang	67.477.603	Block Grant	-		642.289.000
			Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Malang	300 orang	67.477.603	Block Grant	-	300 org	426.911.000
			Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan tagihan belanja listrik, air, telpon, jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat dan jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kota Malang	14 laporan	1.464.888.361				2.276.443.000
			Penyediaan jasa komunikasi, air, dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Malang	12 Laporan	458.170.061	Block Grant	-	12 bulan	190.878.000
			Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	Kota Malang	1 laporan	273.172.000	Block Grant	-	2600 surat	948.751.000

M.IV-5

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2023				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2024	
					Lokasi	Keluaran	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1112	12
			Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Malang	1 Laporan	733.546.300	Block Grant	-	1.182.384 m2	1.136.814.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas / operasional, luasan gedung, peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	Kota Malang	66 Unit	2.191.078.065	Block Grant	-	55 unit	2.301.698.000
			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Malang	55 unit	1.715.598.065	Block Grant	-	55 unit	1.703.253.000
			Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Malang	5 unit	420.480.000	Block Grant	-	646 m2	538.445.000
			Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Malang	6 unit	55.000.000	Block Grant	-	6 jenis	60.000.000
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Jumlah peralatan, perlengkapan gedung kantor	Kota Malang	11 unit	184.717.700	Block Grant	-	11 jenis	424.802.000
			Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Malang	11 unit	184.717.700	Block Grant	-	11 jenis	424.802.000

M.IV-6

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2023				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2024	
					Lokasi	Keluaran	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1112	12
Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro	Persentase koperasi sehat	Jumlah koperasi Sehat dan cukup sehat dibagi jumlah seluruh koperasi yang melaksanakan RAT x 100 %	BIDANG KOPERASI				1.795.329.862,00				2.718.187.700,00
			Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	Kota Malang	57,97%	140.322.450	Block Grant	-	57,97%	409.606.700
			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota	Kota Malang	90 Unit Usaha Koperasi	140.322.450	Block Grant	-	197 koperasi	409.606.700
			Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Malang	90 unit usaha	78.202.650	Block Grant	-	90 Koperasi	215.327.700

M.IV-7

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2023				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2024	
					Lokasi	Keluaran	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1112	12
			Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	Kota Malang	85 unit usaha	62.119.800	Block Grant	-	85 koperasi	194.279.000
			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM koperasi yang didik dan dilatih	Kota Malang	68,51%	499.255.000	Block Grant		68,51%	907.913.100
			Keg.Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaanya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah SDM koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Kota Malang	688 orang	499.255.000	Block Grant		551 orang	907.913.100
			Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Kota Malang	688 orang	499.255.000	Block Grant		1. 1,400 koperasi dan 466 orang 2. 25 sertifikat	907.913.100
			Program Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi	Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP	Kota Malang	91%	195.785.412	Block Grant		91,21%	486.453.100
			Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya	Kota Malang	353 Unit Usaha	195.785.412	Block Grant		353 koperasi	486.453.100

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2023				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2024	
					Lokasi	Keluaran	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1112	12
			Pelaksanaan Penilaian kesehatan KSP / USP koperasi kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Kota Malang	353 Unit Usaha	195.785.412	Block Grant		353 koperasi	486.453.100
			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang diberdayakan dan dilindungi	Kota Malang	73,78%	959.967.000	Block Grant		73,78%	914.214.800
			Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Kota Malang	686 unit usaha	959.967.000	Block Grant		341 koperasi	914.214.800
			Pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Kota Malang	686 unit usaha	959.967.000	Block Grant		1. 70 kop 2. 114 koperasi 3. 502 orang	914.214.800

M.IV-9

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2023				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2024	
					Lokasi	Keluaran	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1112	12
Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro	Persentase kenaikan volume penjualan Usaha Mikro yang difasilitasi usahanya	Jumlah volume Penjualan Usaha Mikro Binaan Tahun n dikurangi Jumlah volume penjualan Usaha Mikro binaan tahun n-1 dibagi Jumlah volume penjualan Usaha Mikro binaan tahun (n-1) dikali 100%	BIDANG USAHA MIKRO				5.040.284.987				6.793.289.995
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Binaan yang Naik Menjadi Usaha Kecil	Kota Malang	5,46%	4.655.593.787	Block Grant		5,46%	5.314.911.295
			Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen usaha mikro yang di data	Kota Malang	1 Dokumen	4.655.593.787	Block Grant		492 UM	5.314.911.295
			Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kota Malang	1 Dokumen	150.433.900	Block Grant		1 aplikasi 2. 5,18%	1.787.445.345

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2023				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2024	
					Lokasi	Keluaran	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1112	12
			Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Kota Malang	137 Unit Usaha	97.210.000	Block Grant		1. 7 UM 2. 137 Um	289.910.200
			Fasilitasi kemudahan perijinan usaha mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Kota Malang	435 Unit Usaha	153.197.612	Block Grant		65 surat ijin, 39 sertifikat, 13 hak merek	285.702.900
			Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Kota Malang	3765 Unit Usaha	4.194.556.675	Block Grant		1.6530 orang 2. 65 UM 3.849 orang	2.870.223.450
			Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kota Malang	137 orang	60.195.600	Block Grant		137 UM	81.629.400
			Program Pengembangan UMKM	Persentase Pertumbuhan Unit Usaha Mikro yang Naik Menjadi Usaha Kecil	Kota Malang	3,60%	384.691.200	Block Grant		3.60%	1.478.378.700
			Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha kecil	Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	Kota Malang	300 Unit Usaha	384.691.200	Block Grant		12 UM	1.478.378.700

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2023				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2024	
					Lokasi	Keluaran	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1112	12
			Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan pemasaran SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kota Malang	300 Unit Usaha	384.691.200	Block Grant		1. 59 UM 2.240 UM	1.478.378.700
			Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dan Perindustrian				43.224.439.964				
			Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan				17.194.673.604				
Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen dan stabilitas harga pokok	Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu	Simpang standar dibagi harga rata-rata dikali 100%	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	1. Persentase peningkatan fasilitas perizinan dan pendaftaran perusahaan 2. Persentase pertumbuhan UKM	Kota Malang	100%	126.800.000	DAU			109.800.047.000
			Kegiatan : Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase penerbitan TDG	Gudang yang ada di Kota Malang	100%	28.510.000	DAU			101.150.047.000
			Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Gudang yang ada di Kota Malang	10 Dokumen	28.510.000	DAU		1. 100% 2. 1,50%	335.000.000

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2023				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2024	
					Lokasi	Keluaran	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1112	12
			Kegiatan : Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	a.Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri b.Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri c.Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	Kota Malang		69.780.000	DAU		4%	75.000.000
			Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Malang	5 Dokumen	69.780.000	DAU		1 kali pembinaa n dan 4 kali pengawas an	75.000.000
			Kegiatan: Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Jumlah dokumen pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	Tempat berjualan minuman beralkoh ol di Kota Malang	5 Dokumen	28.510.000	DAU		a. 0,6% b. 0,6% c. 0,6%	185.000.000
			Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tempat berjualan minuman beralkoh ol di Kota Malang	5 Dokumen	28.510.000	DAU		1. 130 UKM 2. 19 UKM	185.000.000

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2023				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2024	
					Lokasi	Keluaran	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1112	12
Meningkatnya kualitas pasar	Persentase pasar halal	Jumlah pasar yang memenuhi standar akad halal dibagi jumlah seluruh pasar di Kota Malang dikali 100%	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase penetapan pasar rakyat yang ber SNI	Pasar rakyat yang dikelola oleh Pemkot Malang	7,69%	15.742.898.304	Pendapatan Lain-Lain		1 kali pembinaan dan 4 kali pengawasan	75.000.000
			Kegiatan : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	Pasar rakyat yang dikelola oleh Pemkot Malang		15.395.952.704	Pendapatan Lain-Lain		1 kali pembinaan dan 4 kali pengawasan	75.000.000
			Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Pasar rakyat yang dikelola oleh Pemkot Malang	6 Unit	9.074.327.076	Pendapatan Lain-Lain		15,38%	99.522.525.000
			Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana DistribusiPerdagangan	Ops.UPT Pasar	16 Unit	6.321.625.628	Pendapatan Lain-Lain		53,85%	94.415.000.000

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2023				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2024	
					Lokasi	Keluaran	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1112	12
			Kegiatan: Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	1. Jumlah peserta sosialisasi pengelolaan pasar rakyat sesuai SNI, 2. jumlah fasilitasi pasar yang berSNI 3.Jumlah peserta sosialisasi peningkatan ketertiban pasar rakyat, dan 4. Jumlah UKM yang telah melakukan e-commerce	Kota Malang	1. 100 PESERTA 2. 1 PASAR 3. 150 PESERTA 4. 50 ukm	346.945.600	Pendapatan Lain-Lain		1.2 pasar 2. 4 pasar 3. 150 pedagang 4. 250 pedagang 5. 2 kali	88.472.475.000
			Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Malang	1 Dokumen	52.448.800	DAU		16 jenis	5.942.525.000
			Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Malang	1 Dokumen	294.496.800	Pendapatan Lain-Lain		1. 100 PESERTA 2. 1 PASAR 3. 150 PESERTA 4. 50 ukm	5.107.525.000
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase stabilisasi dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	Kota Malang	1,75%	244.730.000	DAU		75 UKM	250.000.000

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2023				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2024	
					Lokasi	Keluaran	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1112	12
			Kegiatan: Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah penayangan informasi harga bahan pokok dan Jumlah pengadaan pasar murah	Kota Malang	350 hari dan 1 kali ops.pasar	244.730.000	DAU		1. 150 pk12. 50 toko modern3. 10 kali	4.857.525.000
			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kota Malang	1 Laporan	197.120.000	DAU			416.000.000
			Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kota Malang	1 Laporan	47.610.000	DAU		90 kali di media cetak, 65 kali di televisi (running text) dan 1 kali di radio, 1 kali pasar murah	416.000.000

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2023				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2024	
					Lokasi	Keluaran	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1112	12
			Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Jumlah Alat UTTP yang di Tera dan Tera Ulang	Kota Malang	100%	391.570.900	DAU		1. 90 kali di media cetak, 65 kali di televisi (running text) dan 1 kali di radio 2. 365 hari 3. 2 kali	303.000.000
			Kegiatan: Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	1. Jumlah Alat UTTP yang di Tera dan Tera Ulang 2. Jumlah Pengawasan 3. Jumlah peserta penyuluhan kemetrologian	Kota Malang	13,400UTTP 4 kali pengawasan 400 orang	391.570.900	DAU		1 kali	113.000.000
			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Kota Malang	13.400 UTTP	361.570.900	DAU		100%	876.522.000
			Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal	Kota Malang	400 orang	30.000.000	DAU		1. 13400 UTTP 2. 20 kali3. 400 PESERTA	876.522.000
			Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase produk UKM yang difasilitasi dengan promosi / pemasaran	Kota Malang	1,50%	637.344.400	DAU		13.400 UTTP	756.522.000

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2023				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2024	
					Lokasi	Keluaran	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1112	12
			Kegiatan: Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UKM yang mengikuti pameran	Kota Malang	30 UMKM	637.344.400	DAU		400 peserta 20 kali	120.000.000
			Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Indonesia	30 UMKM	636.664.400	DAU		1,50%	-
			Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan JaringanInformasi Perdagangan	Kota Malang	1 Dokumen	680.000	DAU		30 UKM	
			Program Pengembangan Ekspor	Persentase pelaku usaha yang memperoleh pelatihan atau fasilitasi pengembangan ekspor	Kota Malang	0,70%	51.330.000				
			Kegiatan: Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada satu daerah Kabupateen/Kota	Jumlah peserta bimtek ekspor bagi UKM Kota Malang		80 Pelaku Usaha	51.330.000				
			Sub Kegiatan: Misi Dagang bagi produk ekspor unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan		80 Pelaku Usaha	51.330.000			0,70%	na

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2023				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2024	
					Lokasi	Keluaran	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1112	12
Meningkat nya pertumbuh an dan daya saing industri	Pertumbu han industri	Laju pertumbuha n industri tahun berjalan	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian				26.029.766.360			80 UKM	250.000.000
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase peningkatan jumlah IKM	Kota Malang	5%	25.889.866.360			15 PRODUK	250.000.000
			Kegiatan: Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Kota Malang	80%	25.889.866.360	Pendapat an Lain- Lain			8.650.000.000
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1.Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya 2.Jumlah sasaran pembangunan sumber daya manusia industri, pengembangan danpemanfaatan teknologi serta pemanfaatan dan jaminan ketersediaan sumber daya alam Industri	Kota Malang	1 Dokumen 350 IKM	421.380.000	Pendapata n Lain- Lain		5%	8.450.000.000
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kota Malang	1 Dokumen	295.770.000	Pendapata n Lain- Lain		80%	8.450.000.000

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2023				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2024	
					Lokasi	Keluaran	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1112	12
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 2. Jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi, industri hijau dan pemberdayaan industri kecil dan menengah	Kota Malang	1 Dokumen 2000 IKM	25.142.716.360	Pendapatan Lain-Lain		350 IKM dan 4 dokumen	2.175.000.000
			Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kota Malang	1 Dokumen	30.000.000	Pendapatan Lain-Lain		100 IKM	2.100.000.000
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase Izin Usaha Industri yang diawasi	Kota Malang	100%	39.900.000	DAU		2000 IKM	23.000.000.000 meliputi: belanja modal (17M), Belanja aktivasi (2 M), Belanja operasional (4M)
			Kegiatan: Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Izin usaha IKM yang dipantau dan diawasi	Kota Malang	100 IKM	39.900.000	DAU		1 dok	50.000.000

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2023				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2024	
					Lokasi	Keluaran	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1112	12
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Malang	1 Dokumen	39.900.000	DAU		100%	100.000.000
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	persentase informasi industri yang lengkap dan terkini		1 sistem	100.000.000			100 IKM	100.000.000
			Kegiatan: Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase data perusahaan IKM yang masuk dalam SIINAS terhadap total populasi perusahaan IKM	Kota Malang	100%	100.000.000	pendapatan lain-lain		100 IKM	100.000.000
			Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kota Malang	1 Dokumen	100.000.000	Pendapatan Lain-Lain		40%	100.000.000

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, 2022

Tabel 4.2
Pemetaan Sub Kegiatan Sesuai KEPMEN 050-5889 Tahun 2023

Kode			Lama				Kode			Baru (Sesuai KEPMEN 050-5889 Tahun 2021)			
			Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan				Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan
(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			(8)	(9)	(10)	(11)
01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6	Dokumen	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dok	
01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	2	Dokumen	01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 laporan	
01	201	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil survey kepuasan masyarakat	5	Dokumen	01	201	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan keuangan	253	ASN	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	
01	202	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah ASN Diskopindag	2	Dokumen	01	202	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	253 orang/bulan	

Kode			Lama				Kode			Baru (Sesuai KEPMEN 050-5889 Tahun 2021)			
			Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan				Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan
(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			(8)	(9)	(10)	(11)
01	203		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				01	203		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
01	203	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah	1	Dokumen	01	203	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	
01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
01	205	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah sumberdaya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya	300	orang	01	205	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	300 orang	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah							Administrasi Umum Perangkat Daerah			
01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	45	kali	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	
01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	3	Jenis Surat Kabar	01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 dokumen	
01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor	54	Jenis	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	54 paket	
01	206	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	16	jenis	01	206	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	16 paket	

Kode			Lama				Kode			Baru (Sesuai KEPMEN 050-5889 Tahun 2021)			
			Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan				Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan
(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			(8)	(9)	(10)	(11)
01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
01	207	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan, perlengkapan gedung kantor	11	Jenis	01	207	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 unit	
01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang teradministrasi dengan baik	2.600	surat	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	1 laporan	
01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja telepon, air dan listrik	12	bulan	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	
01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Luasan ruangan yang dibersihkan	1.182.384	m2	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	
01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	55	unit	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	55 unit	
01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung	6	Jenis	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	

Kode			Lama				Kode			Baru (Sesuai KEPMEN 050-5889 Tahun 2021)			
			Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan				Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan
(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			(8)	(9)	(10)	(11)
				kantor yang dipelihara									
01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luasan gedung kantor yang dipelihara	646	m2	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	
03	201		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				03	201		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			
03	201	01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				03	201	01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			
03	201	02	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Bimtek manajemen pengawasan koperasi	77	Koperasi	03	201	02	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	85 unit usaha	
			Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah unit koperasi yang diperiksa	75	Koperasi				Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	90 unit usaha	
04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			

Kode			Lama				Kode			Baru (Sesuai KEPMEN 050-5889 Tahun 2021)			
			Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan				Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan
(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			(8)	(9)	(10)	(11)
04	201		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				04	201		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
04	201	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Koperasi yang dinilai sehat dan cukup sehat dan Jumlah Unit Koperasi yang mengikuti Sosialisasi E- Penkes	353	Koperasi	04	201	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	353 Unit Usaha	
05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			
05	201		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				05	201		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
05	201	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	1. Jumlah koperasi yang meningkat pemahaman, pengetahuan perkoperasian (pembentukan, perubahan, pembubaran), dan melaksanakan rapat anggota 2. Jumlah pengurus/pengelola Koperasi yang mendapatkan sertifikat (SKKNI)	1. 400 2. 466 3. 25	1. Koperasi 2. orang 3. Sertifikat	05	201	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	688 orang	

Kode			Lama				Kode			Baru (Sesuai KEPMEN 050-5889 Tahun 2021)			
			Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan				Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan
(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			(8)	(9)	(10)	(11)
06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			
06	201		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				06	201		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
06	201	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Jumlah Koperasi yang difasilitasi peningkatan akses permodalan 2. Jumlah koperasi yang difasilitasi pameran produk unggulan 3. Jumlah Pengurus / Pengawas / Pengelola / Anggota Koperasi yang melakukan konsultasi	1. 70 2. 114 3. 502	1. Koperasi 2. Koperasi 3. Orang	06	201	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	686 unit usaha	
07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			
07	201		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				07	201		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			

Kode			Lama				Kode			Baru (Sesuai KEPMEN 050-5889 Tahun 2021)			
			Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan				Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan
(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			(8)	(9)	(10)	(11)
07	201	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1. Jumlah database usaha mikro 2. persentase pertumbuhan WUB mikro yang tumbuh	1 aplikasi 2. 5,18%		07	201	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1 Dokumen	
07	201	02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	1. Jumlah kerja sama atau MoU dari keg. Temu bisnis 2. Jumlah usaha mikro yang melakukan kerjasama dengan pihak ketiga	1. 7 UM 2. 137 Um	UM	07	201	02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	137 Unit Usaha	
07	201	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	1. Jumlah usaha mikro yang memiliki izin sertifikasi, dan mendapatkan perlindungan usaha 2. Jumlah peserta sosialisasi perizinan penerapan, standarisasi dan sertifikasi serta penguatan/ perlindungan bagi usaha mikro	1.435 2. 100	1. Hak merk 2. Orang	07	201	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	435 Unit Usaha	
07	201	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1. Jumlah usaha mikro yang difasilitasi dengan pendampingan klinik 2. Jumlah UM yang difasilitasi pendampingan pemberdayaan 3. Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan ketrampilan kerja bagi Tenaga kerja dan masyarakat	1.6530 orang 2. 65 UM 3.849 orang		07	201	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	3765 Unit Usaha	

Kode			Lama				Kode			Baru (Sesuai KEPMEN 050-5889 Tahun 2021)			
			Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan				Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan
(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			(8)	(9)	(10)	(11)
				(calon wirausaha baru)									
07	201	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah stakeholder yang mengikuti forum komunikasi	137 UM		07	201	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	137 orang	
08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			
08	201		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				08	201		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			
08	201	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	1.Jumlah usaha mikro yang difasilitasi mengikuti pameran/pemasaran produk unggulan 2.Jumlah usaha mikro yang menerapkan peningkatan mutu desain produk usaha dan manajemen keamanan pangan	1. 59 UM 2.240 UM		08	201	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	300 Unit Usaha	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
02	202		Penerbitan Tanda Daftar Gudang				02	202		Penerbitan Tanda Daftar Gudang			
02	202	01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah gudang yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	1 kali pembinaan dan 4 kali pengawasan		02	202	01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	10 Dokumen	

Kode			Lama				Kode			Baru (Sesuai KEPMEN 050-5889 Tahun 2021)			
			Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan				Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan
(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			(8)	(9)	(10)	(11)
02	203		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri				02	203		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri			
02	203	01	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	1. Jumlah UKM yang mengikuti sosialisasi perijinan STPW 2. Jumlah UKM yang mengurus legalitas usaha setelah sosialisasi	1. 130 UKM 2. 19 UKM		02	203	01	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	5 Dokumen	
02	205		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat				02	205		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat			
02	205	01	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah pembinaan dan pengawasan minuman beralkohol	1 kali pembinaan dan 4 kali pengawasan		02	205	01	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	5 Dokumen	
03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
03	201		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				03	201		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			

Kode			Lama				Kode			Baru (Sesuai KEPMEN 050-5889 Tahun 2021)			
			Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan				Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan
(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			(8)	(9)	(10)	(11)
03	201	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	1. Jumlah pasar yang direvitalisasi 2. Jumlah pasar yang dipelihara 3. Jumlah pedagang yang ditampung saat revitalisasi 4. Jumlah pedagang yang akan didata 5. Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi	1.2 pasar 2. 4 pasar 3. 150 pedagang 4. 250 pedagang 5. 2 kali		03	201	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	6 Unit	
03	201	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan operasional	16 jenis		03	201	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	16 Unit	
03	202	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah UKM yang telah melakukan e - commers	75 UKM		03	202	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	
03	202	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1. Jumlah PKL yang menerima penyuluhan 2. Jumlah toko modern yang memiliki legalitas usaha dan pembinaan terhadap pengusaha toko modern 3. Jumlah pelaksanaan monitoring terhadap target retribusi daerah	1. 150 pk 2. 50 toko modern 3. 10 kali		03	202	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	

Kode			Lama				Kode			Baru (Sesuai KEPMEN 050-5889 Tahun 2021)			
			Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan				Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan
(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			(8)	(9)	(10)	(11)
04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			
04	202		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota				04	202		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			
04	202	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1. Jumlah penayangan informasi harga barang pokok dan bahan penting lainnya di media 2. Informasi harga barang kebutuhan pokok dan bahan penting lainnya berbasis online 3. Jumlah pemantauan ketersediaan/distribusi bahan pokok dan bahan penting lainnya	1. 90 kali di media cetak, kali di radio 2. 365 hari 3. 2 kali		04	202	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	
04	202	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan pasar murah	1 kali		04	202	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	
05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			

Kode			Lama				Kode			Baru (Sesuai KEPMEN 050-5889 Tahun 2021)			
			Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan				Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan
(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			(8)	(9)	(10)	(11)
05	201		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				05	201		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
05	201	04	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah produk unggulan ekspor yang mengikuti misi dagang	15 PRODUK		05	201	04	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	80 Pelaku Usaha	
06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
06	201		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, TeraUlang, dan Pengawasan				06	201		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, TeraUlang, dan Pengawasan			
06	201	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang	13.400 UTTP		06	201	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	13.400 UTTP	
06	201	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	1. Jumlah peserta penyuluhan kemetrolagian 2. Jumlah pelaksanaan pengawasan ukur ulang barang non BDKT	400 peserta 20 kali		06	201	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal	400 orang	
07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			

Kode			Lama				Kode			Baru (Sesuai KEPMEN 050-5889 Tahun 2021)			
			Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan				Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan
(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			(8)	(9)	(10)	(11)
07	201		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				07	201		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			
07	201	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UKM yang mengikuti pameran	30 UKM		07	201	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	30 UMKM	
07	201	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah UKM yang di data	650 data		07	201	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	1 Dokumen	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			
02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
02	201		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				02	201		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			

Kode			Lama				Kode			Baru (Sesuai KEPMEN 050-5889 Tahun 2021)			
			Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan				Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan
(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			(8)	(9)	(10)	(11)
02	201	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah sasaran pembangunan sumber daya manusia industri, pengembangan dan pemanfaatan teknologi serta pemanfaatan dan jaminan ketersediaan sumber daya alam	350 IKM dan 4 dokumen		02	201	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1.Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan Sumber Daya 2.Jumlah sasaran pembangunan sumber daya manusia industri, pengembangan dan pemanfaatan teknologi serta pemanfaatan dan jaminan ketersediaan sumber daya alam Industri	1 Dokumen 350 IKM	
02	201	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah penerima fasilitasi standarisasi dan pengembangan perwilayahan industri	100 IKM		02	201	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	
02	201	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi, industri hijau dan pemberdayaan industri kecil dan menengah	2000 IKM		02	201	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 2.Jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi, industri hijau dan pemberdayaan industri kecil dan menengah	1 Dokumen 2000 IKM	
02	201	06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah dokumen evaluasi rencana pembangunan industri Kota Malang	1 dok		02	201	06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	

Kode			Lama				Kode			Baru (Sesuai KEPMEN 050-5889 Tahun 2021)			
			Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan				Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan
(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			(8)	(9)	(10)	(11)
03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA				03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA			
03	201		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota				03	201		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota			
03	201	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Izin usaha IKM yang dipantau dan diawasi	100 IKM		03	201	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	
04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			
04	201		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota				04	201		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota			

Kode			Lama				Kode			Baru (Sesuai KEPMEN 050-5889 Tahun 2021)			
			Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan				Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan
(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			(8)	(9)	(10)	(11)
04	201	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah data yang dimutakhirkan	300 data yang dimutakhirkan		04	201	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, 2022

BAB V

PENUTUP

Proses demokrasi pembangunan telah menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama proses pembangunan, sedang peran pemerintah lebih bersifat sebagai regulator, fasilitator dan stimulator. Perubahan paradigma pembangunan tersebut mengubah peran masyarakat dalam proses pembangunan dan yang bersifat partisipasi masyarakat menjadi prakarsa masyarakat. Dengan demikian, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebagai ujung tombak urusan koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan merupakan posisi yang sangat penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dibidang pembangunan ekonomi secara berkelanjutan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan ini adalah dokumen perencanaan PD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam rangka penyusunan Renja, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dengan segala sumber daya yang dimiliki serta kewenangan sebagaimana tugas pokok fungsi dinas akan mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan manusia seutuhnya, sekaligus dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan secara rinci, terarah, efektif, efisien, terpadu, dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Malang untuk periode satu tahun ke depan.

Adapun Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang mempertimbangkan berbagai permasalahan dan isu-isu strategis terkait bidang perkoperasian, usaha mikro, perindustrian dan perdagangan baik ditingkat Internasional, regional, nasional, Provinsi Jawa Timur hingga kota. Selain itu Renja ini sedapat mungkin mengupayakan sinkronisasi dengan kebijakan-kebijakan nasional yang diambil oleh kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Forum musyawarah Rencana Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2023 juga menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun Renja ini.

Nilai anggaran yang tercantum dalam renja ini masih bersifat indikatif. Dengan demikian penyusunan Renja dan Anggaran (RKA) PD Tahun Anggaran 2021 selain mengacu pada Renja ini juga menyesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023, diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi pihak yang membutuhkan serta sebagai evaluasi dan motivasi bagi organisasi perangkat daerah adapun ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, berupa :

- a. Catatan Penting Penyusunan Renja Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2018-2023. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas. Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah (PD) serta pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui Musrenbang Kota, Musrenbang Kecamatan dan melalui forum Organisasi Perangkat Daerah (Forum PD), agar program dan kegiatan terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor.

- b. Kaidah Pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan merupakan dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun yang mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan. Terwujudnya Renja PD merupakan prasyarat bagi setiap PD untuk memudahkan pengimplementasian dari penyusunan rencana strategis pada kurun waktu tertentu. Penyusunan Renja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023 ini sangat penting guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan tahun 2018-2023 sesuai dengan RPJMD Kota Malang Periode 2019-2023. Kaidah-kaidah pelaksanaan:
 1. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Tahun 2023 ini dengan sebaik-baiknya;
 2. Kepala Dinas bertanggung jawab sepenuhnya terhadap implementasi, pengendalian, dan evaluasi seluruh program dan kegiatan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
 3. Sekretaris dan Kepala Bidang berkewajiban melaksanakan program berdasarkan target-target kinerja sasaran setelah ditetapkannya rencana kerja ini sebagai program dan kegiatan Tahun 2023;
 4. Para Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi membantu secara teknis Sekretaris dan Kepala Bidang dalam pencapaian target kinerja dari setiap kegiatan sesuai bidang tugasnya setelah ditetapkannya rencana kerja ini sebagai program dan kegiatan Tahun 2023;
 5. Staf membantu Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dalam melaksanakan kegiatan masing-masing; dan
 6. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dapat melakukan revisi/perubahan terhadap program, kegiatan, indikator kinerja dan target kinerja yang tidak sesuai dengan kondisi terkini

dengan melakukan Perubahan Renja PD Tahun 2023 yang disusun secara paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD Kota Malang Tahun 2023 sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kota Malang Tahun 2023.

c. Rencana Tindak Lanjut

1. Koordinasi dan Konsultasi yang lebih intensif dengan stakeholder untuk lebih memaksimalkan pencapaian target sasaran PD;
2. Peningkatan Sumberdaya Aparatur melalui Diklat formal, bimbingan teknis atau kegiatan lainnya yang dapat menunjang peningkatan kinerja aparatur;
3. Mereview pencapaian target kinerja sebagai dasar perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya;
4. Pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih baik dan terstruktur dalam mendukung pencapaian target kinerja; dan
5. Mengoptimalkan sumberdaya aparatur dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.
6. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dapat melakukan revisi/perubahan terhadap program, kegiatan, indikator kinerja dan target kinerja yang tidak sesuai dengan kondisi terkini dengan melakukan Perubahan Renja PD Tahun 2023 yang disusun secara paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD Kota Malang Tahun 2023 sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kota Malang Tahun 2023.